



**ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI, KEBIJAKAN
FISKAL DAN MONETER TERHADAP KEMISKINAN DI
SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

**Nama : AMANDA NOVIARISKA
NPM : 1515210013**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan jumlah penduduk, investasi, inflasi dan kemiskinan terhadap pengangguran dan untuk mengetahui pengaruh secara simultan PAD, Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap kemiskinan Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu : terjadi peningkatan terhadap pengangguran yang cukup tinggi di beberapa tahun selama dua puluh tiga tahun terakhir, dan terjadi peningkatan yang cukup tinggi terhadap kemiskinan di beberapa tahun selama dua puluh tiga tahun terakhir di Sumatera Utara.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) mulai tahun 1996 sampai dengan 2018. Model analisa data dalam penelitian ini adalah analisis persamaan Simultan. Variabel yang diteliti yaitu: jumlah penduduk, investasi, inflasi, pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi pengangguran dan kemiskinan.

Hasil analisis persamaan Simultan menunjukkan bahwa jumlah penduduk, investasi, inflasi, dan kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Sumatera Utara. Kemudian Pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran juga berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Sumatera Utara.

Kata kunci: kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, fiskal, dan moneter.

ABSTRACT

This research aims to determine the simultaneous effect of the population total, investments, inflation, and poverty on unemployment and to determine simultaneous effect of local income, economic growth and unemployment on poverty in North Sumatera Province Based on the explanation above, it can be identified problems related to this research, namely: there has been an increase in unemployment which is quite high in recent years over the past two three years, and there has been a significant increase in poverty in several years for twenty-three years lastly in North Sumatra.

This study uses secondary data sourced from the Central Statistics Agency (BPS) from 1996 to 2018. The data analysis model in this study is Simultaneous equation analysis. Variables examined were: population, investment, inflation, regional income, unemployment and poverty

Simultaneous Regression results show the population, investment, inflation, and poverty have a significant effect on unemployment in North Sumatra. Local income, economic growth and unemployment have a significant effect on poverty in North Sumatra.

Keyword: poverty, economic growth, fiscal, and monetary.

DAFTAR ISI

| | HALAMAN |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN | iv |
| ABSTRAK | vi |
| ABSTRACT | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Penelitian..... | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 21 |
| C. Batasan Masalah..... | 21 |
| D. Rumusan Masalah..... | 21 |
| E. Tujuan Penelitian..... | 21 |
| F. Manfaat Penelitian..... | 22 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 23 |
| A. Landasan Teori | 23 |
| 1. Pengertian Kemiskinan | 23 |
| 2. Ukuran Kemiskinan | 25 |
| 3. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi..... | 28 |
| 4. Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi | 28 |
| 5. Jumlah Penduduk | 29 |
| 6. Investasi | 30 |
| 7. Pendapatan Asli Daerah..... | 31 |
| 8. Pengangguran..... | 32 |

| | |
|---|-----------|
| 9. Inflasi | 37 |
| B. Penelitian Sebelumnya | 40 |
| C. Kerangka Konseptual | 45 |
| D. Hipotesis Penelitian | 45 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 46 |
| A. Jenis Penelitian | 46 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian | 46 |
| C. Definisi Operasional Variabel | 47 |
| D. Sumber Data | 48 |
| E. Teknik Pengumpulan Data Penelitian | 48 |
| F. Teknik Analisis Data | 48 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 52 |
| A. Deskripsi Data | 52 |
| B. Hasil Penelitian..... | 54 |
| a. Uji Asumsi Klasi..... | 54 |
| b. Pengujian Simultan..... | 56 |
| c. UJI T | 61 |
| d. UJI D..... | 62 |
| e. UJI T | 66 |
| f. UJI D | 66 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... | 69 |
| A. KESIMPULAN | 69 |
| B. SARAN..... | 70 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar I.1. Pengangguran di Sumatera Utara Tahun 1996-2018 | 3 |
| Gambar I.2. Tingkat Kemiskinan di Sumatera Utara Tahun 1996-2018..... | 5 |
| Gambar I.3. Jumlah Penduduk di Sumatera Utara Tahun 1996-2018..... | 7 |
| Gambar I.4. Investasi di Sumatera Utara Tahun 1996-2018 | 9 |
| Gambar I.5. Grafik PAD di Sumatera Utara Tahun 1996-2018..... | 11 |
| Gambar I.6. Inflasi di Sumatera Utara Tahun 1996-2018 | 14 |
| Gambar I.7. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Tahun 1996 – 2018..... | 17 |
| Gambar 2.1. Kerangka Konseptual..... | 45 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1 Data Pengangguran Provinsi Sumatera Utara Tahun 1996-2018..... | 4 |
| Tabel 1.2 Data Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara Tahun 1996-2018 | 6 |
| Tabel 1.3 Data Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Utara Tahun 1996-2018 | 8 |
| Tabel 1.4 Data Investasi Provinsi Sumatera Utara Tahun 1996-2018 | 10 |
| Tabel 1.5 Data Pad Provinsi Sumatera Utara Tahun 1996-2018..... | 12 |
| Tabel 1.6 Data Inflasi Provinsi Sumatera Utara Tahun 1996-2018 | 15 |
| Tabel 1.7 Data Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara Tahun 1996-2018 | 18 |
| Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu..... | 40 |
| Tabel 3.1. Jadwal Penelitian | 46 |

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada ALLAH karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat mengajukan proposal ini yang disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Adapun judul yang penulis ajukan adalah sebagai berikut : “Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kebijakan Fiskal dan Moneter Terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara.”

Dalam mempersiapkan proposal ini, penulis banyak menerima bantuan berupa bimbingan dan petunjuk. Untuk itu pada kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua (ALM) Ayahanda Ali Hasmi dan Ibunda Nur Azizah yang telah melahirkan saya kemuka bumi ini dan kepada Muhammad Nazri Arliyandi selaku abang saya.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE.,MM selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu Dr. Surya Nita, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Bapak Bakhtiar Efendi, SE.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
5. Ibu Lia Nazliana Nasution, SE.,M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Diwayana Putri Nasution, SE.,M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah

meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga proposal ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Seluruh Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dari awal kuliah hingga sekarang ini.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga dalam penyusunan proposal ini nantinya dapat berguna bagi penulis dan para pembaca sekalian, dan terutama sekali lagi kepada Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Mudah-mudahan penulis dapat menyelesaikan proposal ini tepat pada waktunya.

Medan, 23 oktober 2019
Penulis

Amanda noviariska

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir di semua negara sedang berkembang. Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia sehingga produktifitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah.

Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah utama dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan serta pertumbuhan ekonomi di semua sektor pembangunan, pemerataan pembangunan yang optimal, perluasan tenaga kerja dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Dalam mencapai tujuan pembangunan secara menyeluruh diperlukan adanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata.

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan nasional adalah salah satu upaya untuk menjadi tujuan masyarakat adil dan makmur. Sejalan dengan tujuan tersebut, berbagai kegiatan pembangunan telah diarahkan kepada pembangunan daerah khususnya daerah yang relatif mempunyai PDRB yang terus naik dari tahun ke tahun. Pembangunan daerah dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Oleh karena itu, salah satu

indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin. Efektifitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi pembangunan. Hal ini berarti salah satu kriteria utama pemilihan sektor titik berat atau sektor andalan pembangunan nasional adalah efektifitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin (Wijayanto, 2010).

Dimensi kemiskinan dapat berbentuk dari aspek ekonomi, aspek SDM, fisik/infrastruktur, masalah sosial dan keluarga/rumah tangga. Perlu diperhatikan bahwa yang dibutuhkan masyarakat miskin tidak hanya bantuan modal/materi, tetapi juga suatu kondisi yang kondusif yang memungkinkan mereka untuk membentuk jaringan sosial dan ekonomi di antara mereka sendiri. Pemerintah daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seringkali merupakan lembaga yang terbaik untuk menyediakan lingkungan seperti tersebut (Sumedi dan Supardi, 2014).

Pertumbuhan ekonomi merupakan tema sentral dalam kehidupan ekonomi semua Negara di dunia dewasa ini. Pemerintah di Negara manapun dapat segera jatuh atau bangun berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapainya dalam catatan statistik nasional. Berhasil tidaknya program-program di negara-negara dunia ketiga sering dinilai berdasarkan tinggi rendahnya tingkat output dan pendapatan nasional (Todaro, 2010).

Pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang terencana menuju keadaan masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik, atau dengan kata lain meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejak tahun 1969 pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia mulai melaksanakan pembangunan nasional di

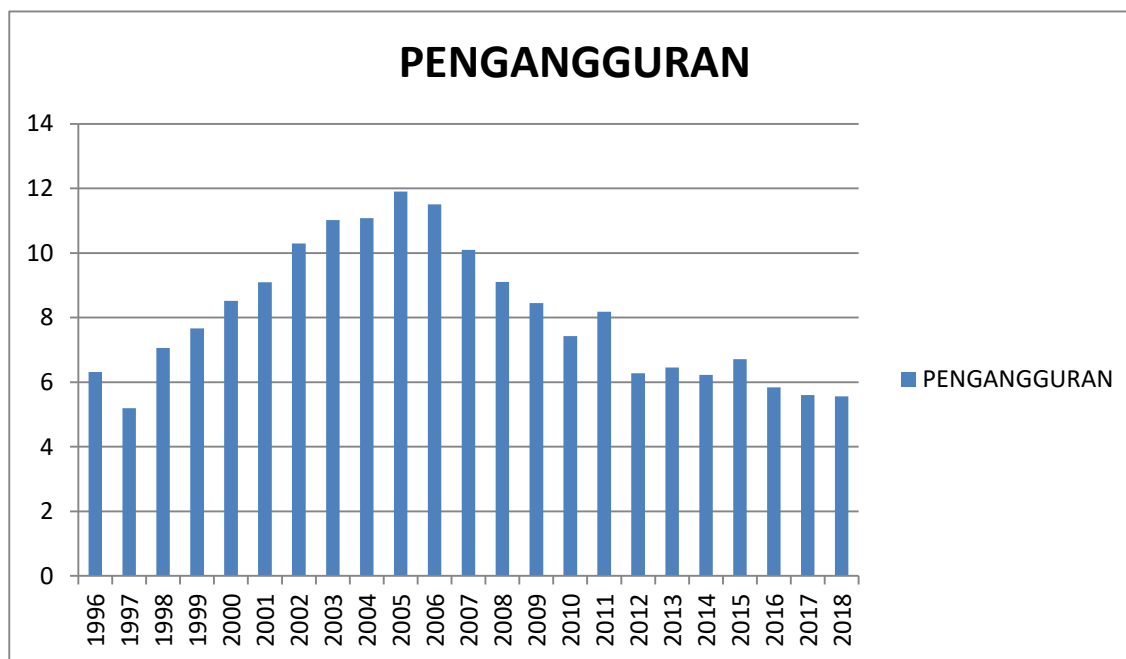
segala bidang. Pemerintah pusat dan daerah terus bekerja sama untuk melakukan kegiatan pembangunan di berbagai bidang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga mencapai tujuan tersebut. Namun, pembangunan tidak cukup dilihat dari pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga harus dilihat dari seberapa besar kemampuan pertumbuhan tersebut menjawab masalah-masalah ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran dan inflasi. Pembangunan dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan, ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan

Tabel 1.1
Data Pengangguran Provinsi Sumatera Utara Tahun 1996-2018

| TAHUN | PENGANGGURAN |
|-------|--------------|
| 1996 | 6.32 |
| 1997 | 5.19 |
| 1998 | 7.06 |
| 1999 | 7.67 |
| 2000 | 8.52 |
| 2001 | 9.09 |
| 2002 | 10.3 |
| 2003 | 11.02 |
| 2004 | 11.08 |
| 2005 | 11.9 |
| 2006 | 11.51 |
| 2007 | 10.1 |
| 2008 | 9.1 |
| 2009 | 8.45 |
| 2010 | 7.43 |
| 2011 | 8.18 |
| 2012 | 6.28 |
| 2013 | 6.45 |
| 2014 | 6.23 |
| 2015 | 6.71 |

| | |
|------|------|
| 2016 | 5.84 |
| 2017 | 5.6 |
| 2018 | 5.56 |

Sumber : BPS, 2019.



Sumber : Tabel 1.1

Gambar I.1. Pengangguran di Sumatera Utara Tahun 1996-2018

Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Dari data di atas dapat diketahui bahwa pada tingkat pengangguran di Sumatera Utara mengalami fluktuatif. Rata-rata persentase tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Utara adalah 62,3 %. Tingkat pengangguran yang tertinggi 11,51 %, sedangkan tingkat pengangguran terendah

terjadi pada tahun 2018 yaitu 5,56 %. Penganggur yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat penganggur yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara

Kecenderungan peningkatan jumlah pengangguran di Indonesia yang cepat terjadi sejak terkena dampak krisis tahun 1997 hingga saat ini disebabkan adanya berbagai faktor yang secara simultan dan kompleks berpengaruh di dalamnya. Faktor penyebab utama yaitu, ketidakmampuan pasar kerja menyediakan lapangan kerja dan ketidakmampuan pertumbuhan pasar kerja mengimbangi pertumbuhan jumlah angkatan kerja setiap tahunnya.

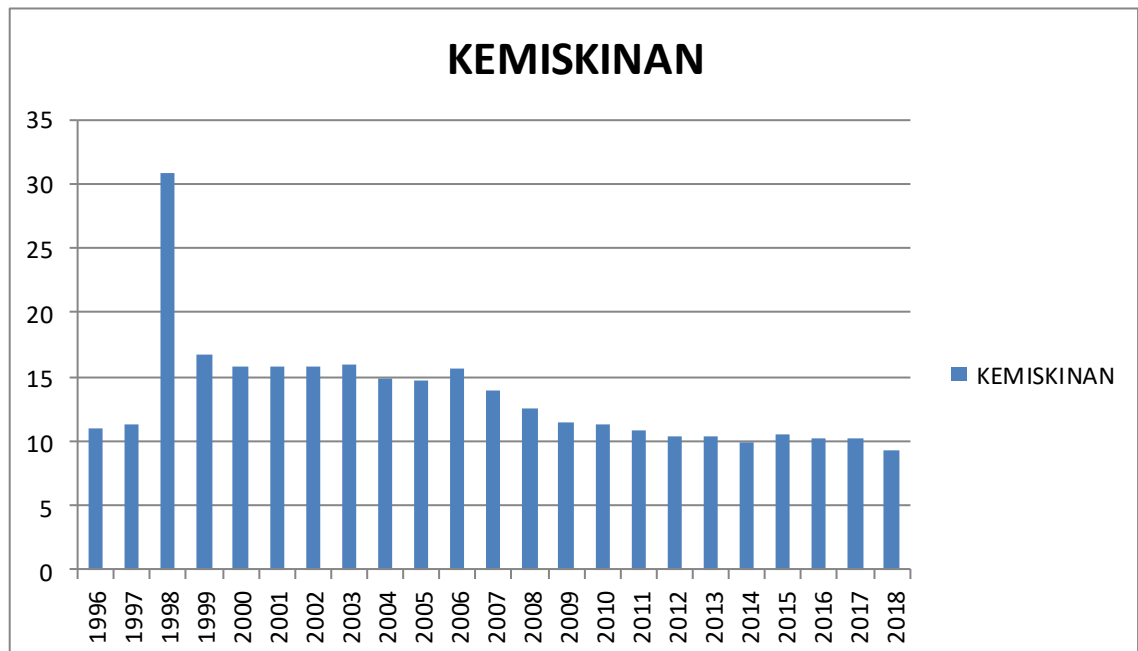
Hasil studi empiris yang dilakukan oleh Purnama (2016) dengan metode analisis lintas negara menunjukkan bahwa kemiskinan di suatu negara akan semakin rendah jika pertumbuhan ekonominya pada tahun-tahun sebelumnya tinggi dan semakin tinggi laju pertumbuhan PDB semakin cepat turunnya PDRB (Tambunan, 2010).

Tabel 1.2
Data Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara Tahun 1996-2018

| TAHUN | KEMISKINAN |
|-------|------------|
| 1996 | 10.92 |
| 1997 | 11.27 |
| 1998 | 30.77 |
| 1999 | 16.74 |
| 2000 | 15.84 |
| 2001 | 15.75 |
| 2002 | 15.84 |
| 2003 | 15.89 |
| 2004 | 14.93 |
| 2005 | 14.68 |

| | |
|------|-------|
| 2006 | 15.66 |
| 2007 | 13.9 |
| 2008 | 12.55 |
| 2009 | 11.51 |
| 2010 | 11.36 |
| 2011 | 10.83 |
| 2012 | 10.41 |
| 2013 | 10.39 |
| 2014 | 9.85 |
| 2015 | 10.53 |
| 2016 | 10.35 |
| 2017 | 10.22 |
| 2018 | 9.22 |

Sumber : BPS, 2019.



Sumber : Tabel 1.2

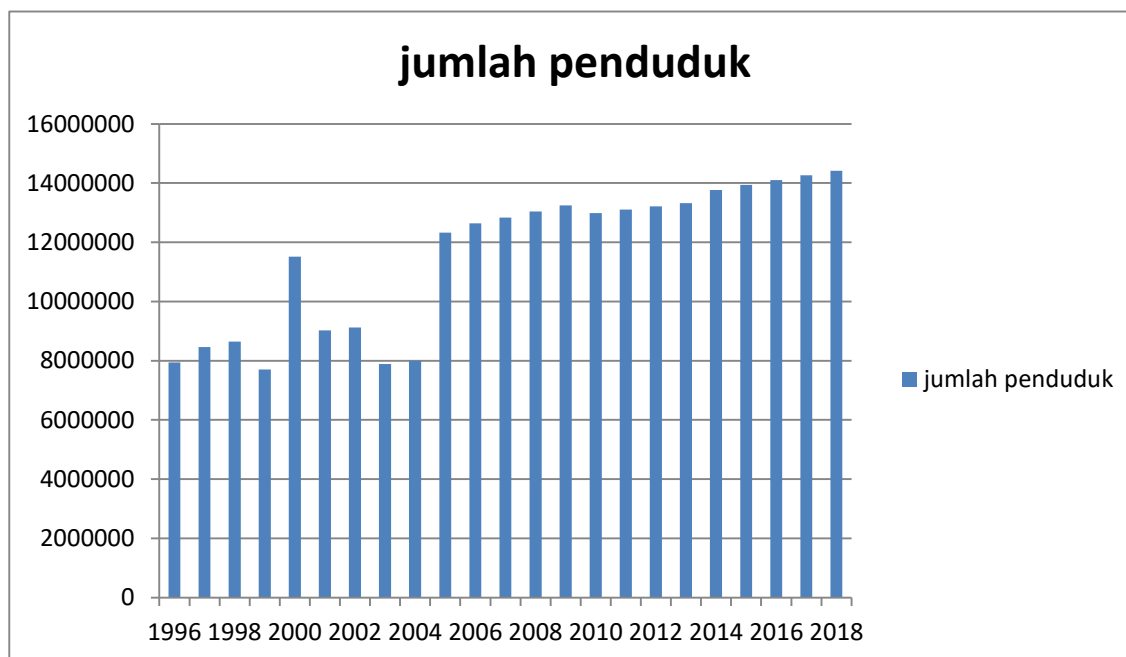
Gambar I.2. Tingkat Kemiskinan di Sumatera Utara Tahun 1996-2018

Dari data di atas dapat diketahui bahwa pada tingkat kemiskinan di Sumatera Utara mengalami fluktuatif. Rata-rata persentase tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara adalah 13,981 %. Tingkat kemiskinan yang tertinggi 30,77 %, sedangkan tingkat kemiskinan terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu 9,22 %.

Tabel 1.3
Data Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Utara Tahun 1996-2018

| TAHUN | JUMLAH PENDUDUK |
|-------|--------------------|
| 1996 | 7944352 |
| 1997 | 8.466.792 |
| 1998 | 8.644.378 |
| 1999 | 7.705.624 |
| 2000 | 11.513.973 |
| 2001 | 9.023.803 |
| 2002 | 9.119.076 |
| 2003 | 7.890.583 |
| 2004 | 7.997.002 |
| 2005 | 12.326.678 |
| 2006 | 12.643.494 |
| 2007 | 12.834.371 |
| 2008 | 13.042.317 |
| 2009 | 13.248.386 |
| 2010 | 12.982.204 |
| 2011 | 13.103.596 |
| 2012 | 13.215.401 |
| 2013 | 13.326.307 |
| 2014 | 13.766.851 |
| 2015 | 13.937.797 |
| 2016 | 14.102.911 |
| 2017 | 14.262.147 |
| 2018 | 14.415.400 |

Sumber : BPS, 2019.



Sumber :Tabel 1.3

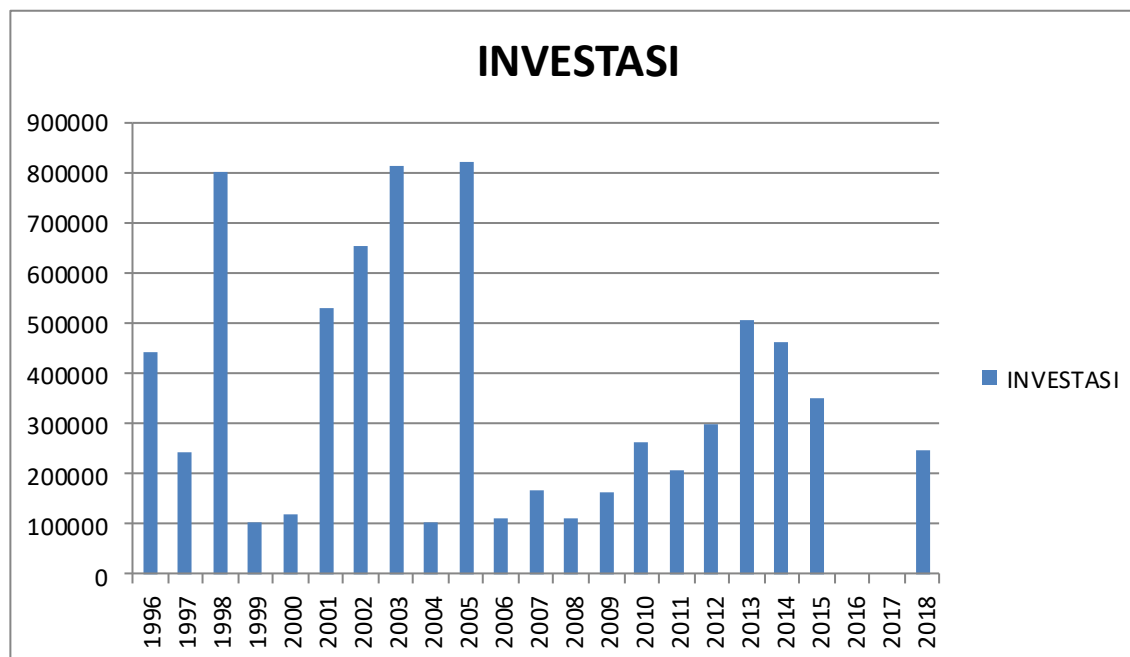
Gambar I.3. Jumlah Penduduk di Sumatera Utara Tahun 1996-2018

Dari data di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Sumatera Utara mengalami fluktuatif. Jumlah penduduk yang tertinggi pada tahun 2018 sebanyak 14.415.400 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah terjadi pada tahun 2003 yaitu 7.890.583. Terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah ini selanjutnya membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pada wilayah bersangkutan. Biasanya implikasi ini ditimbulkan adalah dalam bentuk kecemburuan dan ketidakpuasan masyarakat yang dapat pula berlanjut dengan implikasi politik dan ketentraman masyarakat. Karena itu, aspek ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah ini perlu ditanggulangi melalui formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Tabel 1.4
Data Investasi Provinsi Sumatera Utara Tahun 1996-2018

| TAHUN | INVESTASI |
|-------|-------------------|
| 1996 | 443.599.240.000 |
| 1997 | 240.692.160.000 |
| 1998 | 80.063.680.000 |
| 1999 | 102.716.340.000 |
| 2000 | 119.777.750.000 |
| 2001 | 528.644.950.000 |
| 2002 | 653.034.220.000 |
| 2003 | 8.133.693.080.000 |
| 2004 | 1.046.028.390.000 |
| 2005 | 821.643.740.000 |
| 2006 | 1.094.245.380.000 |
| 2007 | 1.672.463.330.000 |
| 2008 | 1.091.333.720.000 |
| 2009 | 1.644.965.260.000 |
| 2010 | 2.625.438.970.000 |
| 2011 | 2.049.055.778.000 |
| 2012 | 2.970.186.190.000 |
| 2013 | 5.068.881.400.000 |
| 2014 | 4.631.925.850.000 |
| 2015 | 3.487.417.300.000 |
| 2016 | 4.864.200.000 |
| 2017 | 11.683.600.000 |
| 2018 | 24.820.000.000 |

Sumber : BPS, 2019.



Sumber : Tabel 1.4

Gambar I.4. Investasi di Sumatera Utara Tahun 1996-2018

Apabila dilihat dari potensi yang dimilikinya, Provinsi Sumatera Utara memiliki peluang yang sangat besar untuk aktivitas penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA). Dari data di atas dapat diketahui bahwa investasi di Sumatera Utara mengalami fluktuatif. Investasi yang tertinggi pada tahun 2018 mencapai 24.820.000.000 Miliar, sedangkan investasi terendah terjadi pada tahun 1998 yaitu hanya mencapai 80.063.680.000 . Provinsi Sumatera Utara memiliki letak geografi yang strategis, Serta memiliki sumber daya manusia yang cukup tersedia dan sumber daya alam yang cukup melimpah seperti berupa bahan mentah dari hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan yang dapat dipergunakan untuk membangun sektor industri. Selain itu terdapat pula potensi yang besar dari sektor-sektor lainnya seperti sektor pertambangan, sektor perindustrian, sektor pariwisata, dan sektor jasa. Meskipun memiliki potensi yang

unggul, namun daya tarik investor untuk menanamkan modalnya di Provinsi Sumatera Utara masih dinilai kurang.

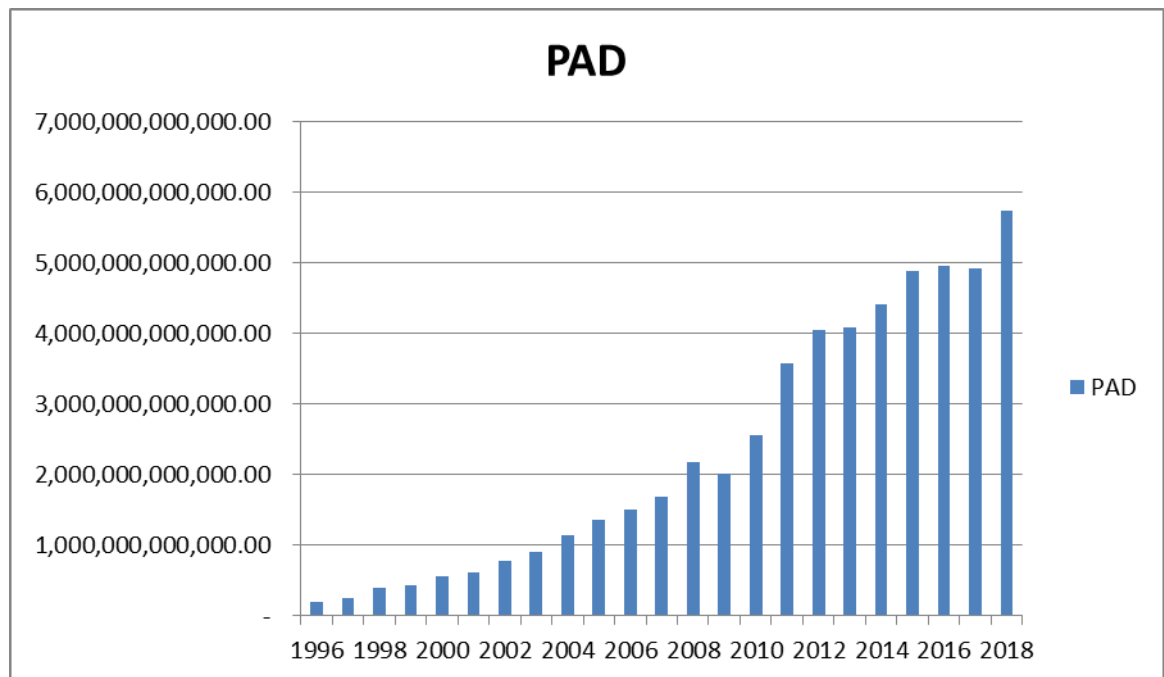
Melihat kondisi sumber penerimaan di Sumatera Utara, ternyata Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum bisa diharapkan untuk dijadikan tumpuan dalam mencukupi kebutuhan dana untuk pengeluaran daerah. Untuk menghindari persoalan dalam era desentralisasi pada masa mendatang, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara perlu melakukan upaya-upaya yang serius dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari PAD. Kondisi Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Utara ditunjukkan dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah hanya sekitar 25% dari penerimaan daerah Sumatera Utara.

Tabel 1.5
Data Pad Provinsi Sumatera Utara Tahun 1996-2018

| TAHUN | PAD |
|-------|-------------|
| 1996 | 1.87738E+11 |
| 1997 | 2.55078E+11 |
| 1998 | 3.96469E+11 |
| 1999 | 4.37075E+11 |
| 2000 | 5.60313E+11 |
| 2001 | 6.14459E+11 |
| 2002 | 7.79616E+11 |
| 2003 | 9.11754E+11 |
| 2004 | 1.13607E+12 |
| 2005 | 1.36182E+12 |
| 2006 | 1.50261E+12 |
| 2007 | 1.69385E+12 |
| 2008 | 2.18131E+12 |
| 2009 | 2.01607E+12 |
| 2010 | 2.55478E+12 |
| 2011 | 3.57846E+12 |
| 2012 | 4.0521E+12 |
| 2013 | 4.09129E+12 |

| | |
|------|-------------|
| 2014 | 4.41681E+12 |
| 2015 | 4.88388E+12 |
| 2016 | 4.691E+12 |
| 2017 | 49260000000 |
| 2018 | 5.73243E+14 |

Sumber : BPS, 2019



Sumber : Tabel 1.5

Gambar I.5. Grafik PAD di Sumatera Utara Tahun 1996-2018.

Sejalan hal tersebut, maka perlu dilakukan Kajian Pengembangan Potensi Pendapatan Asli Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara. Dari data di atas dapat diketahui bahwa pada Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Utara mengalami fluktuatif. Pendapatan Asli Daerah yang tertinggi pada tahun 2018 sebesar 5.732.425.486.154.00, sedangkan Pendapatan Asli Daerah terendah terjadi pada tahun 1996 yaitu sebanyak 187.738.013.000.000. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Ciri utama

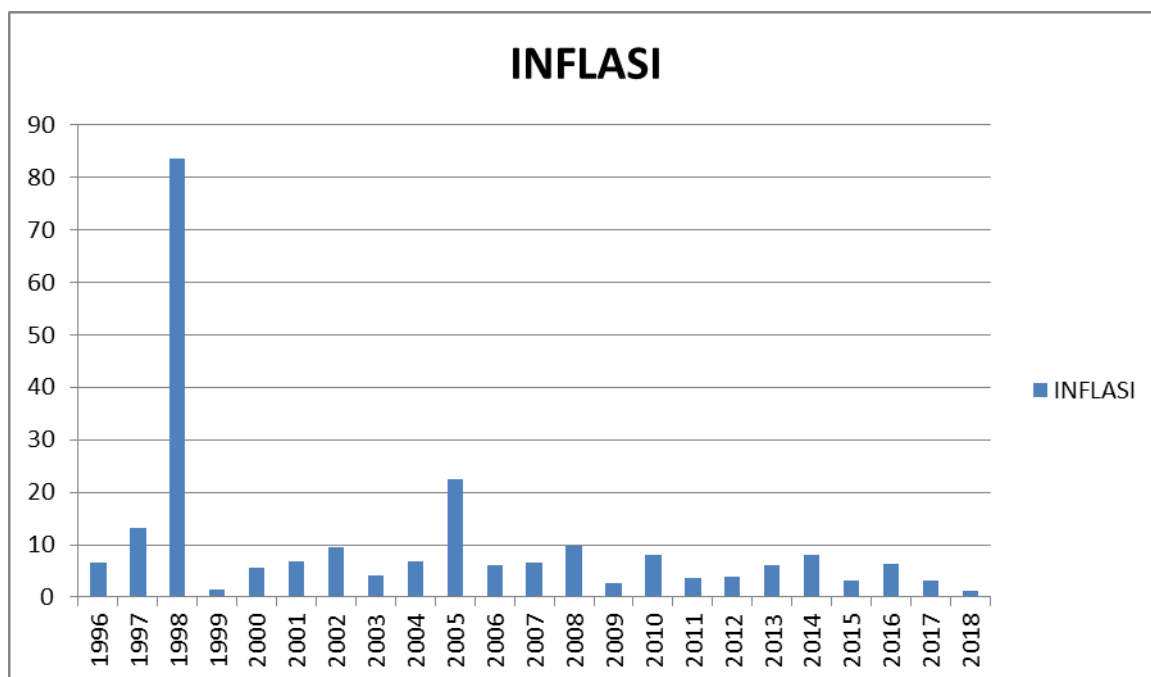
yang menunjukkan suatu daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak menjadi bagian sumber keuangan terbesar (Koswara, 2011).

Untuk meningkatkan potensi sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah atau juga biasa disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), ada beberapa faktor yang perlu diberdayakan diantaranya adalah investasi, obligasi dan PDRB perkapita. Untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangan dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah pada pelaksanaan otonomi daerah terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, sehingga sudah sewajarnya apabila PAD dijadikan salah satu barometer dalam pelaksanaan otonomi daerah. Masalahnya proporsi penerimaan yang berasal dari PAD Provinsi jumlahnya kecil, sehingga terjadi ketidakseimbangan keuangan daerah (*fiscal gap*) antara kemampuan daerah (*fiscal capacity*) dan kebutuhan daerah (*fiscal need*).

Tabel 1.6
Data Inflasi Provinsi Sumatera Utara Tahun 1996-2018

| TAHUN | INFLASI |
|-------|---------|
| 1996 | 6.7 |
| 1997 | 13.1 |
| 1998 | 83.56 |
| 1999 | 1.37 |
| 2000 | 5.73 |
| 2001 | 6.79 |
| 2002 | 9.59 |
| 2003 | 4.23 |
| 2004 | 6.8 |
| 2005 | 22.41 |
| 2006 | 6.11 |
| 2007 | 6.6 |
| 2008 | 9.72 |
| 2009 | 2.61 |
| 2010 | 8 |
| 2011 | 3.67 |
| 2012 | 3.86 |
| 2013 | 6.18 |
| 2014 | 8.17 |
| 2015 | 3.24 |
| 2016 | 6.34 |
| 2017 | 3.2 |
| 2018 | 1.23 |

Sumber : BPS, 2019



Sumber :Tabel 1.6

Gambar I.6. Inflasi di Sumatera Utara Tahun 1996-2018

Tingkat inflasi berpengaruh negatif pada tingkat investasi. Hal ini disebabkan karena apabila tingkat inflasi yang terlalu tinggi maka akan terjadi penurunan output. Namun inflasi juga dapat berdampak positif terhadap investasi apabila tingkat investasinya rendah. Karena dapat memberikan keuntungan kepada pengusaha. Hal ini mungkin disebabkan oleh masih minimnya usaha pemerintah untuk meningkatkan daya tarik investasi. Dari data di atas dapat diketahui bahwa pada tingkat inflasi di Sumatera Utara mengalami fluktuatif. Rata-rata persentase inflasi di Provinsi Sumatera Utara adalah 21,2 %. Tingkat inflasi yang tertinggi pada tahun 1998 mencapai 83,56 %, sedangkan tingkat inflasi terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu 1,23 %. Selain masalah kemiskinan, maka masalah investasi juga mempengaruhi PDRB di Sumatera Utara. Investasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (BKPM, dalam Adithya: 2007). Investasi dalam negeri juga merupakan

komponen penting dalam pendapatan nasional selain konsumsi dan pengeluaran pemerintah. Investasi pada hakikatnya yaitu langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi dan mencerminkan marak lesunya pembangunan. Dalam upaya menumbuhkan perekonomian, maka pemerintah berupaya menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. Upaya yang diciptakan pemerintah dalam menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi salah satunya menerapkan berbagai aturan mengenai investasi, diantaranya adalah undang-undang No 1 tahun 1967, No 11 tahun 1970, tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan UU No 6 tahun 1968, No 12 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Dimaksudkan adanya UU No. 11 tahun 1970 selain membawa dana masuk, juga membawa serta teknologi produksi, manajemen dan akses ke pasar dunia. Kemudian untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif maka pada tahun 1984 dilakukan debirokrasi dan deregulasi. Melalui usaha ini kinerja investasi menunjukkan perkembangan yang positif (Sastrowardoyo, 1994). Pada tahun 1994 lewat PP No 30 tahun, pemerintah memperbolehkan investasi dikuasai oleh 95% PMA. Upaya-upaya tersebut ditujukan untuk memperbaiki iklim usaha di dalam negeri sehingga pada akhirnya dapat menarik untuk melakukan penanaman modal dalam negeri.

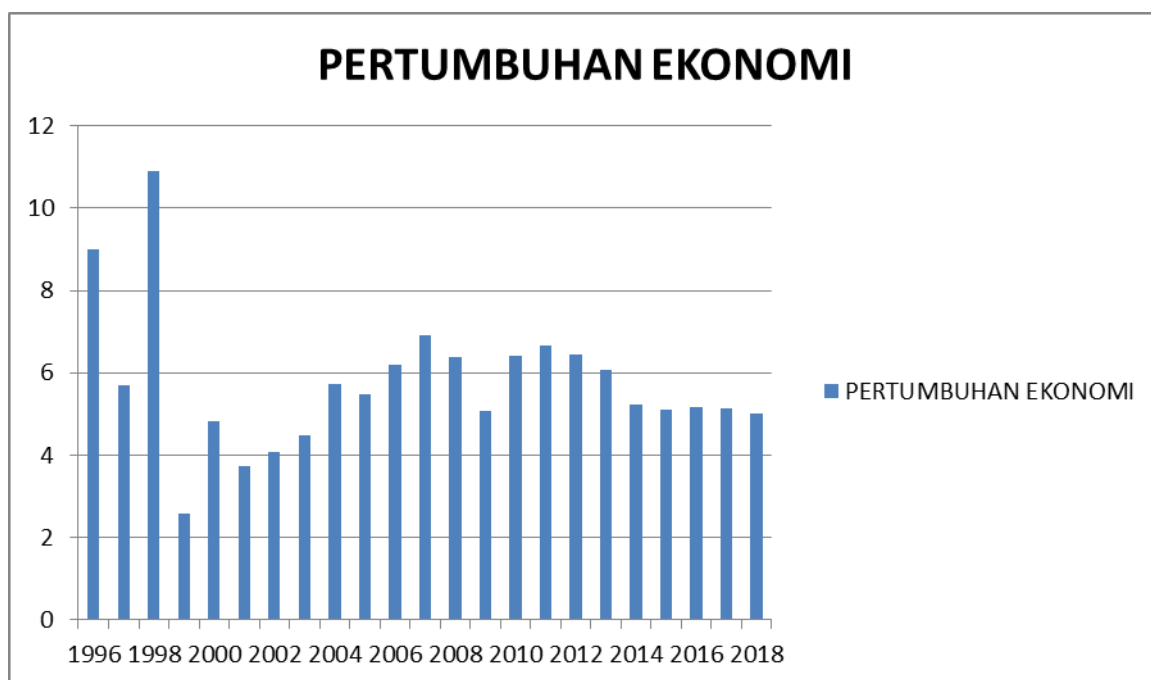
Pelaksanaan investasi merupakan salah satu bentuk nyata dalam pembangunan nasional. (Sukirno, dalam Depari: 2012) menyatakan bahwa investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-

barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Penanaman modal yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri dalam suatu daerah ini diharapkan mampu terus memacu pertumbuhan ekonomi dan diharapkan dapat menciptakan *multiplier effect*, yaitu kegiatan tersebut dapat mempengaruhi kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya dan pada akhirnya akan membantu menjawab persoalan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan.

Tabel 1.7
Data Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara Tahun 1996-2018

| TAHUN | PERTUMBUHAN EKONOMI |
|-------|---------------------|
| 1996 | 9.01 |
| 1997 | 5.7 |
| 1998 | 10.9 |
| 1999 | 2.59 |
| 2000 | 4.83 |
| 2001 | 3.72 |
| 2002 | 4.07 |
| 2003 | 4.48 |
| 2004 | 5.74 |
| 2005 | 5.48 |
| 2006 | 6.2 |
| 2007 | 6.9 |
| 2008 | 6.39 |
| 2009 | 5.07 |
| 2010 | 6.42 |
| 2011 | 6.66 |
| 2012 | 6.45 |
| 2013 | 6.07 |
| 2014 | 5.23 |
| 2015 | 5.09 |
| 2016 | 5.18 |
| 2017 | 5.12 |
| 2018 | 5.02 |

Sumber : BPS, 2019



Sumber :Tabel 1.7

Gambar I.7. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Tahun 1996 – 2018

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur dengan melihat PDRB dan laju pertumbuhannya atas harga konstan. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada tahun 1996-2018 yaitu sebesar 4,76%. Tahun 1996-2009 pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara cenderung menurun dan berfluktuatif. Di tahun 1996-1997 mengalami penurunan sebesar 3,31%. Namun, pada tahun 1997-2009 pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara masih dibawah 9% (lebih tinggi dari tahun 1996). Khusus di tahun 1998 pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yaitu sebesar 10,90% dikarenakan dampak dari krisis moneter yang terjadi di Indonesia. Selama periode 2001-2008, perekonomian Sumatera Utara menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun yaitu berkisar 3,72% sampai 6,39%. Tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara menurun dikisaran 5,07% tetapi tahun 2010 sampai tahun 2013 mengalami peningkatan kembali dikisaran 6%. Dan di

tahun 2014 dan 2015 pertumbuhan ekonomi menurun kembali dikisaran 5%. Namun pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara tidak selalu diiringi dengan penurunan kemiskinan yang signifikan di propinsi Sumatera Utara. Bahkan ketika indikator perekonomian Sumatera Utara naik di tahun 2001-2003 tingkat kemiskinan juga naik mencapai 15,89%.

Faktor yang mempengaruhi kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan disertai hasil pertumbuhan ke seluruh sektor usaha sangat dibutuhkan dalam upaya menurunkan PDRB. Maka untuk mempercepat penurunan PDRB, pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan. Dan diharapkan sektor pertanian, sektor industri pengolahan dan sektor jasa yang meningkat dapat menurunkan PDRB di propinsi Sumatera Utara.

Pembangunan yang tidak merata dan terpusat pada beberapa sektor ekonomi di beberapa wilayah dengan sumber daya yang tinggi menyebabkan tingkat ketimpangan ekonomi di Sumatera masih tinggi walaupun Sumatera Utara mengalami Pertumbuhan Ekonomi. Ketimpangan timbul dikarenakan tidak adanya pemerataan dalam pembangunan ekonomi. Ketidakmerataan pembangunan ini disebabkan karena adanya perbedaan antara wilayah satu dengan lainnya. Hal ini terlihat dengan adanya wilayah yang maju dengan wilayah yang terbelakang atau kurang maju. Ketimpangan memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari adanya ketimpangan adalah dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya guna meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan dampak negatif dari ketimpangan yang ekstrim antara lain inefisiensi ekonomi,

melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil (Todaro, 2010).

Pemerintah baik pusat maupun daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan namun masih jauh dari induk permasalahan. Kebijakan dan program yang dilaksanakan belum menampakkan hasil yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergis sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas.

Dimensi kemiskinan dapat berbentuk dari aspek ekonomi, aspek SDM, fisik/infrastruktur, masalah sosial dan keluarga/rumah tangga. Perlu diperhatikan bahwa yang dibutuhkan masyarakat miskin tidak hanya bantuan modal/materi, tetapi juga suatu kondisi yang kondusif yang memungkinkan mereka untuk membentuk jaringan sosial dan ekonomi di antara mereka sendiri. Pemerintah daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seringkali merupakan lembaga yang terbaik untuk menyediakan lingkungan seperti tersebut (Sumedi dan Supadi, 2004).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul judul **“Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Kebijakan Fiskal dan Moneter Terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara”**.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Terjadi peningkatan yang cukup tinggi angka pengangguran pada tahun 2004, 2005, dan 2006.
2. Terjadi peningkatan yang cukup tinggi angka kemiskinan pada tahun 1998.

C. Batasan Masalah

Untuk membatasi permasalahan dan menghindari pembahasan yang tidak perlu dan tidak tepat sasaran, maka penulis hanya membahas mengenai pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal dan moneter terhadap kemiskinan di Sumatera Utara.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh secara simultan jumlah penduduk, investasi, inflasi dan kemiskinan terhadap pengangguran Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana pengaruh secara simultan PAD, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap kemiskinan Provinsi Sumatera Utara?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan jumlah penduduk, investasi, inflasi dan kemiskinan terhadap pengangguran Provinsi Sumatera Utara
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan pad, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap kemiskinan Provinsi Sumatera Utara

F. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan dalam hasil penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak pihak yang berkepentingan dan dapat dijadikan standard bagi penulis dalam melakukan kegiatan.
2. Dapat merealisasikan hasil penelitian dan digabungkan dengan ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan selama menjadi Mahasiswi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu situasi atau kondisi yang dialami seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi (Sumedi dan Supardi, 2014). Sedangkan menurut Chamsyah (2016) menyatakan bahwa kemiskinan merupakan suatu kondisi hidup yang merujuk pada keadaan kekurangan atau kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Seseorang dikatakan miskin, apabila mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.

Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau suatu kelompok hidup dibawah garis kemiskinan dengan standar hidup yang rendah. Sebagai akibat dari standar hidup yang relatif rendah karna tingkat pendapatan yang rendah, ketimpangan pendapatan yang parah, dan lain-lain. Sebutan standar hidup adalah manifestasi perbandingan jumlah pendapatan, perumahan, pendidikan, kesehatan, angka kematian, serta peluang mendapat pekerjaan (Todaro, 2010 : 52)

Kemiskinan menurut *World Bank* merupakan keadaan dimana seorang individu atau kelompok tidak memiliki pilihan atau peluang untuk meningkatkan taraf hidupnya guna menjalani kehidupan yang sehat dan lebih baik sesuai standar hidup, memiliki harga diri dan dihargai oleh sesamanya. Standar rasio tingkat kemiskinan yang ditetapkan oleh *WorldBank*.

Robert Chamber (2010) mengatakan bahwa kemiskinan merupakan suatu *intergrated concept* yang memiliki lima dimensi sedangkan kelima dimensi tersebut membentuk suatu perangkap kemiskinan (*deprivation trap*), yaitu

- a. Kemiskinan itu sendiri,
- b. Ketidakberdayaan (*powerless*),
- c. Kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*),
- d. Ketergantungan (*dependency*), dan
- e. Keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis.

Dari definisi diatas diperoleh pengertian bahwa kemiskinan merupakan kondisi hidup seseorang yang merujuk pada keadaan kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup pokoknya dan tidak dapat menikmati kehidupannya dalam hal kesehatan, ibadah menurut agamanya, pendidikan, pekerjaan, pendapatan yang tinggi dan standar hidup yang layak.

Mengidentifikasi mengenai penyebab kemiskinan, terdapat banyak versi. Menurut Kuncoro (2010:107) dipandang dari sisi ekonomi penyebab kemiskinan antara lain, Pertama, secara mikro kemiskinan timbul akibat ketidaksamaan pola pemikiran sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Kedua, kemiskinan timbul akibat ketidaksamaan dalam kualitas sumber daya manusia. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses modal.

Menurut Jhingan (2010:18) Terdapat empat faktor yang menjadi penyebab terjadinya fenomena kemiskinan, yaitu :

- a. Rendahnya tingkat pendidikan
- b. Rendahnya derajat kesehatan
- c. Terbatasnya lapangan kerja

d. Kondisi keterisolasian

Penyebab kemiskinan menurut Spicker (2012) dapat dibagi menjadi empat:

- a. *Individual Explanation*, kemiskinan yang terjadi karena karakteristik orang miskin itu sendiri, seperti malas, pilihan yang salah, gagal dalam berkerja, cacat bawaan, belum siap memiliki anak, dan sebagainya.
- b. *Familiar Explanation*, kemiskinan yang terjadi karena faktor keturunan, dimana antar generasi ke generasi terjadi ketidakberuntungan yang terjadi terus menerus, sehingga tidak mampu memperoleh pendidikan yang seharusnya mampu untuk mengeluarkan dari jerat kemiskinan yang ada.
- c. *Subcultural Explanation*, kemiskinan yang terjadi karena karakteristik yang terdapat dalam suatu lingkungan, yang berakibat pada moral dari masyarakat di sekitar lingkungan
- d. *Structural Explanation*, kemiskinan yang terjadi karena adanya anggapan bahwa kemiskinan sebagai produk dari masyarakat, sehingga menciptakan adanya ketidakseimbangan dan ketimpangan sosial dengan membedakan status dan hak.

2. Ukuran Kemiskinan

Menurut BPS, tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yaitu 2100 per orang per hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang berada di lapisan bawah) dan konsumsi non makanan (dari 45 jenis komoditi makanan sesuai kesepakatan nasional dan tidak dibedakan antara wilayah pedesaan dan perkotaan). Patokan kecukupan 2100 kalori ini berlaku untuk semua umur, jenis kelamin dan perkiraan

tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta perkiraan status fisiologis penduduk, ukuran ini sering disebut dengan garis kemiskinan. Penduduk yang memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan dikatakan dalam kondisi miskin.

Secara sederhana dan umumnya ukuran kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga yaitu :

a. Kemiskinan Absolut

Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup.

b. Kemiskinan Relatif

Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan konsep ini, kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah sehingga konsep kemiskinan ini bersifat dinamis atau akan selalu ada.

c. Kemiskinan Kultural

Seseorang termasuk golongan miskin kultural apabila sikap orang atau sekelompok masyarakat tersebut tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya atau dengan kata lain seseorang tersebut miskin karena sikapnya sendiri yaitu pemalas dan tidak mau memperbaiki kondisinya.

Semua ukuran kemiskinan dipertimbangkan berdasarkan pada norma pilihan dimana norma tersebut sangat penting terutama dalam hal pengukuran didasarkan konsumsi (*consumption based poverty line*). Oleh sebab itu, garis kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi terdiri dari dua elemen (Ravi Dwi Wijayanto, 2010) yaitu :

- a. Pengeluaran yang diperlukan untuk member standar minimum dan kebutuhan mendasar lainnya.
- b. Jumlah kebutuhan yang sangat bervariasi yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Foster, dkk (Tambunan, 2011) terdapat tiga indikator untuk mengukur kemiskinan yang sering digunakan di dalam banyak studi empiris. Pertama, *the incidence of poverty* : persentase dari populasi yang hidup di dalam keluarga dengan pengeluaran konsumsi per kapita di bawah garis kemiskinan. Indeksnya sering disebut rasio H. Kedua, *the depth of poverty* yang menggambarkan dalamnya kemiskinan di suatu wilayah yang diukur dengan indeks jarak kemiskinan (IJK) atau dikenal dengan sebutan poverty gap index. Indeks ini mengestimasi jarak/perbedaan rata-rata pendapatan orang miskin dari garis kemiskinan sebagai suatu proporsi dari garis tersebut. Ketiga, *the serverity of poverty* yang diukur dengan indeks keparahan kemiskinan (IKK). Indeks ini pada prinsipnya sama seperti IJK. Namun, selain mengukur jarak yang memisahkan orang miskin dari garis kemiskinan, IKK juga mengukur ketimpangan di antara penduduk miskin atau penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks ini yang juga disebut *Distributionally Sensitive Index* yang dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan.

3. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2016) pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah.

Pertumbuhan ekonomi menurut Budiono (2009) merupakan proses kenaikan kapasitas produksi dalam suatu perekonomian secara berkesinambungan menuju ke arah yang lebih baik yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional (Produk Domestik Bruto) maupun pendapatan daerah (Produk Domestik Regional Bruto) dalam jangka panjang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi menurut kaum klasik (Adam Smith, David Richardo, Thomas Robert Malthus, dan John Straurt Mill) dan kaum neo-classic (Robert Solow dan Trevor Swan), yaitu :

- a. Jumlah penduduk;
- b. Jumlah stok barang dan modal;
- c. Luas tanah dan kekayaan alam; dan
- d. Teknologi.

Sedangkan menurut Schumpeter, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu : (1) Inovasi; dan (2) Pelaku inovasi (*Entrepreneur*).

4. Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Todaro (2010) ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa. Ketiganya adalah :

- a. Akumulasi modal, meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia
- b. Pertumbuhan penduduk

c. Kemajuan teknologi

Menurut Sukirno (2016) terdapat empat faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi, ke empat faktor tersebut adalah :

- a. Tanah dan kekayaan alam lainnya
- b. Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja
- c. Barang-barang modal dan tingkat teknologi
- d. Sistem sosial dan sikap masyarakat

5. Jumlah Penduduk

Lembaga BPS dalam Statistik Indonesia (2013) menjabarkan “penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap”. Sedangkan menurut Said (2012: 136) yang dimaksud dengan penduduk adalah “jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses-proses demografi yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi”.

Reverend Thomas Maltus pada tahun 1798 (Arsyad, 2014: 223) mengemukakan teorinya tentang hubungan pertumbuhan penduduk dengan pembangunan ekonomi. Dalam tulisannya yang berjudul *Essay on the Principle of Population*, ia melukiskan konsep hasil yang menurun (concept of diminishing return). Maltus menjelaskan kecenderungan umum penduduk suatu negara untuk tumbuh menurut deret ukur yaitu dua-kali lipat setiap 30-40 tahun. Sementara itu saat yang sama, karena hasil yang menurun dari faktor produksi tanah, persediaan pangan hanya tumbuh menurut deret hitung. Oleh karena pertumbuhan persediaan pangan tidak bisa mengimbangi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dan

tinggi, maka pendapatan perkapita (dalam masyarakat tani didefinisikan sebagai produksi pangan perkapita) akan cenderung turun menjadi sangat rendah, yang menyebabkan jumlah penduduk tidak pernah stabil, atau hanya sedikit di atas tingkat subsisten yaitu pendapatan yang hanya dapat untuk memenuhi kebutuhan sekedar untuk hidup.

Menurut Maier (Kuncoro, 2017: 17) di kalangan para pakar pembangunan telah ada konsensus bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak hanya berdampak buruk terhadap supply bahan pangan, namun juga semakin membuat kendala bagi pengembangan tabungan, cadangan devisa, dan sumberdaya manusia.

6. Investasi

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang (Tendellin, 2011:1). Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Menginvestasikan dana pada sektor rill (tanah, emas, mesin atau bangunan) maupun asset finansial (deposito, saham atau obligasi), merupakan aktifitas yang umum di lakukan.

Menurut Jogiyanto (2013:5), investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien dalam periode waktu tertentu. Sedangkan menurut Menurut Sukirno kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat.

Nizar (2013:3), peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni :

- a. Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja;
- b. Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi;
- c. Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

7. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pendapatan asli. Beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli antara lain : “Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan dan faktor keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri”. Definisi ini dikemukakan oleh pemuji yang dikutip oleh Riwu Kaho (2005: 78).

Menurut Badrudin (2011:99), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam

menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia NO. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar komposisi pendapatan asli daerah, maka semakin pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar. Tetapi semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pusat semakin besar. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan meliputi berbagai sektor diantaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya.

8. Pengangguran

Penganggur adalah suatu keadaan di mana seseorang tergolong dalam angkatan kerja yang ingin mendapat pekerjaan tetapi belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut (Sukirno, 2016: 472). Sedangkan pada Sumarsono (2009: 259) pengangguran adalah seseorang atau lebih yang berada dalam kategori angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan atau secara aktif sedang dalam pencarian pekerjaan.

Ketidak seimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja berdampak pada perekonomian suatu negara, Todaro (2010 : 320), sebagian besar pengangguran adalah merupakan kelompok masyarakat paling miskin, yang tidak memiliki pekerjaan teratur atau yang bekerja secara musiman. Namun tidak setiap orang yang tidak bekerja pasti miskin, selalu saja ditemukan pengangguran sukarela di negara berkembang, yaitu yang dengan mudah dapat memperoleh pekerjaan yang baik, tapi memilih menganggur karena jenis pekerjaan tidak sesuai dengan pendidikan, kualifikasi kecakapan, aspirasi pribadi, target finansial maupun standar gengsi.

Pengangguran menurut *World Bank* merupakan individu yang digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, namun tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Jenis-jenis pengangguran menurut Sukirno (2016) berdasarkan keadaan yang menyebabkan, yaitu :

a. Pengangguran friksional

Pengangguran friksional merupakan pengangguran yang disebabkan karena seseorang meninggalkan pekerjaannya dan mencari pekerjaan yang lebih baik dan sesuai dengan keinginannya.

b. Pengangguran struktural

Pengangguran struktural merupakan pengangguran yang terjadi karena adanya pertumbuhan ekonomi. Penyebab terjadinya pengangguran struktural antara lain, yaitu :

1) Teknologi semakin berkembang

Teknologi yang semakin berkembang mengakibatkan tenaga kerja manusia berpindah kepada tenaga mesin, dikarenakan tenaga kerja mesin lebih efisien dan murah, terlebih lagi permintaan akan barang produksi industri yang semakin meningkat membuat produsen mengganti tenaga kerja manusia menjadi tenaga kerja mesin, hal ini mengakibatkan pengangguran tenaga kerja akibat pengalihan fungsi tenaga kerja manusia ke tenaga kerja mesin.

2) Persaingan global

Persaingan global atau luar negeri dimana produk luar negeri lebih murah dan lebih baik dibandingkan dengan produksi lokal baik karena produksi luar negeri yang lebih efisien ataupun adanya kebijakan luar negeri yang menyebabkan barang luar negeri lebih murah dibandingkan produk lokal. Hal ini mengakibatkan permintaan akan produk lokal semakin menurun. Produksi industri lokal menjadi tidak mampu bersaing dengan produksi luar negeri, sehingga mengalami kebangkrutan, yang pada akhirnya akan memunculkan pengangguran.

3) Kemunduran perekonomian

Kemunduran perekonomian dalam suatu daerah dikarenakan adanya kemajuan perekonomian yang pesat di daerah lain, sehingga antar daerah tidak mampu bersaing, pada akhirnya daerah yang tidak mampu bersaing akan menghasilkan pengangguran

c. Pengangguran alamiah

Pengangguran alamiah merupakan pengangguran yang berlaku pada tingkat kesempatan kerja penuh. Kesempatan kerja penuh merupakan keadaan dimana sekitar 95 persen dari angkatan kerja dalam suatu waktu sepenuhnya bekerja. Pengangguran sebanyak 5 persen inilah yang dikatakan sebagai pengangguran alami.

d. Pengangguran konjungtur

Pengangguran konjungtur merupakan pengangguran yang melebihi pengangguran ilmiah. Secara umum pengangguran konjungtur terjadi akibat adanya pengurangan permintaan agregat. Penurunan permintaan agregat menyebabkan perusahaan harus mengurangi jumlah tenaga kerja ataupun harus tutup usaha, sehingga memunculkan pengangguran konjungtur.

Jenis-jenis pengangguran berdasarkan ciri-cirinya, yaitu :

a. Pengangguran terbuka

Pengangguran terbuka merupakan pengangguran yang terjadi karena semakin bertambahnya pertumbuhan tenaga kerja dan masih sedikitnya lapangan pekerjaan, sehingga banyak tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. Menurut Badan Pusat Statistika (BPS), pengangguran terbuka merupakan penduduk yang sudah memasuki usia angkatan kerja namun tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, ataupun sudah memiliki pekerjaan namun belum memulai bekerja.

b. Pengangguran tersembunyi

Pengangguran tersembunyi merupakan pengangguran dimana suatu kegiatan ekonomi (kegiatan produksi) yang dilakukan oleh tenaga kerja yang

jumlahnya melebihi jumlah yang seharusnya atau melebihi standart yang ada. Pengangguran ini biasanya terjadi pada lembaga atau organisasi dimana suatu pekerjaan yang sebenarnya bisa dilakukan oleh satu orang, namun diposisikan sendiri kepada orang lain, sehingga menjadi tidak efektif.

c. Pengangguran musiman

Pengangguran musiman merupakan pengangguran dimana pada masa-masa tertentu dalam satu tahun. Pengangguran ini biasanya terjadi di sektor pertanian, dimana petani akan menganggur saat menunggu masa tanam dan jeda antara musim tanam dan musim panen.

d. Pengangguran setengah menganggur

Pengangguran setengah menganggur merupakan pengangguran dimana seseorang bekerja dibawah jam kerja normal. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jam tenaga kerja normal di Indonesia yaitu 35 jam/minggu, sehingga tenaga kerja yang bekerja dibawah 35 jam/minggu masuk kedalam golongan setengah menganggur.

Landasan teori tentang pengangguran yang ada dalam penelitian ini menggunakan konsep teori pengangguran menurut *World Bank* merupakan individu yang digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, namun tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan.

Pengukuran pengangguran dalam penelitian ini menggunakan tingkat pengangguran terbuka provinsi-provinsi di Indonesia. Pengangguran mengakibatkan berkurangnya pendapatan dalam masyarakat. Pendapatan masyarakat mencapai titik maksimal apabila penggunaan tenaga kerja penuh dapat

tercapai. Pengangguran yang ada dalam masyarakat menghambat pendapatan masyarakat mencapai titik maksimal, sehingga menurunkan kemakmuran yang harusnya mampu dicapai. Dengan demikian masyarakat yang menganggur akan meningkatkan peluang memasuki kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Dengan demikian, pengangguran memiliki hubungan yang positif terhadap kemiskinan, semakin banyak masyarakat yang menganggur, maka akan cenderung semakin banyak pula kemiskinan dalam masyarakat.

9. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam menganalisis perekonomian dalam suatu negara, terutama mengingat pengaruh yang sangat luas terhadap variabel makro ekonomi agregat seperti daya saing, tingkat bunga, harga barang, dan kemiskinan. Inflasi secara umum merupakan perkembangan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara, inflasi sering terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara jumlah uang yang beredar dalam masyarakat lebih besar dibandingkan dengan jumlah barang atau jasa yang tersedia. Tingkat inflasi ideal atau standart pada setiap negara berbeda-beda, tergantung pada kondisi perekonomian dan sosial masyarakat yang ada pada negara tersebut.

Kondisi ideal tingkat inflasi pada negara maju berbeda dengan kondisi ideal tingkat inflasi pada negara berkembang. Inflasi menurut Badan Pusat Statistika (2015) merupakan kenaikan harga barang atau jasa secara umum dalam suatu daerah atau negara dimana barang dan jasa tersebut merupakan barang kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang dalam suatu

daerah atau negara. Budiono (2009 : 173) menjelaskan berdasarkan sudut pandang strukturalis bahwa sebab-sebab terjadinya inflasi berasal dari kekakuan struktur ekonomi, dimana penawaran bahan makanan dan barang-barang ekspor, sehingga menyebabkan pertambahan produksi barang lebih lambat dibandingkan dengan peningkatan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian mengakibatkan penawaran (*supply*) barang dan jasa dalam masyarakat lebih rendah daripada penawaran (*demand*) barang dan jasa dalam masyarakat, sehingga harga barang dan jasa menjadi meningkat.

Beberapa teori mengenai inflasi :

- a. Teori Kuantitas, mengatakan bahwa inflasi terjadi karena adanya penambahan volume uang yang beredar dalam masyarakat, baik uang kartal maupun uang giral.
- b. Teori Keynes, mengatakan bahwa proses inflasi merupakan proses perebutan pendapatan diantara kelompok-kelompok sosial di masyarakat yang menginginkan bagian yang lebih besar dibandingkan dengan yang disediakan dalam masyarakat.
- c. Teori Strukturalis, atau sering disebut sebagai teori inflasi jangka panjang, mengatakan bahwa sebab-sebab terjadinya inflasi berasal dari kekakuan struktur ekonomi, dimana penawaran bahan makanan dan barang-barang ekspor, sehingga menyebabkan pertambahan produksi barang lebih lambat dibandingkan dengan peningkatan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian mengakibatkan penawaran (*supply*) barang dan jasa dalam masyarakat lebih rendah daripada penawaran (*demand*) barang dan jasa dalam masyarakat, sehingga harga barang dan jasa menjadi meningkat.

Beberapa dampak buruk inflasi dalam beberapa aspek, yaitu :

a. Dampak terhadap perekonomian

Inflasi menyebabkan terjadinya defisit dalam neraca perdagangan serta meningkatkan besarnya hutang luar negeri. Inflasi meningkatkan tingkat bunga dan pada akhirnya akan mengurangi investasi.

b. Dampak terhadap individu dan masyarakat

Inflasi memperburuk distribusi pendapatan.

Inflasi menyebabkan pendapatan riil dan nilai tabungan merosot.

Jenis-jenis penggolongan inflasi, yaitu :

- a. Inflasi ringan, merupakan tingkat inflasi kurang dari 10 persen ($I < 10\%$).
- b. Inflasi sedang, merupakan tingkat inflasi antara 10 sampai 30 persen ($10\% < I < 30\%$).
- c. Inflasi berat, merupakan tingkat inflasi antara 30 sampai 100 persen ($30\% < I < 100\%$).
- d. *Hyper* inflasi, merupakan tingkat inflasi lebih dari 100 persen ($I > 100\%$).

Landasan teori tentang inflasi dalam penelitian ini menggunakan konsep teori menurut Badan Pusat Statistika (2015) dimana Inflasi merupakan perkembangan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara, inflasi sering terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara jumlah uang yang beredar dalam masyarakat lebih besar dibandingkan dengan jumlah barang atau jasa yang tersedia. Budiono menjelaskan berdasarkan Teori Strukturalis atau sering disebut sebagai teori inflasi jangka panjang, bahwa sebab-sebab terjadinya inflasi berasal dari kekakuan struktur ekonomi, dimana

penawaran bahan makanan dan barang-barang ekspor, sehingga menyebabkan pertambahan produksi barang lebih lambat dibandingkan dengan peningkatan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian mengakibatkan penawaran (*supply*) barang dan jasa dalam masyarakat lebih rendah daripada penawaran (*demand*) barang dan jasa dalam masyarakat, sehingga harga barang dan jasa menjadi meningkat. Pengukuran inflasi dalam penelitian ini menggunakan tingkat inflasi pada setiap provinsi-provinsi di Indonesia.

Inflasi secara langsung akan mempengaruhi kinerja perusahaan (menurunkan laba) di sektor riil karena meningkatnya biaya produksi (*cost production*). Dengan demikian, harga barang dan jasa dalam masyarakat akan meningkat dan menyebabkan daya beli masyarakat akan menurun. Harga barang dan jasa kebutuhan yang meningkat, akan menyebabkan masyarakat dengan upah (tetap) menengah ke bawah menjadi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya seperti biasa, sehingga tingkat kemiskinan di masyarakat akan meningkat dengan meningkatnya harga yang ada di masyarakat karena tingkat inflasi yang meningkat.

B. Penelitian Sebelumnya

Tinjauan peneliti terdahulu digunakan sebagai referensi untuk penelitian lanjutan. Berikut ini adalah tabel tinjauan penelitian terdahulu.

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

| No. | Peneliti | Judul | Hasil |
|-----|----------------|--|---|
| 1 | Purnama (2016) | Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap | Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di propinsi Sumatera Utara. |

| | | | |
|---|------------------------------|--|---|
| | | Tingkat Kemiskinan Di Sumatera Utara | |
| 2 | Hariani dan Syahputri (2016) | Analisis Ketimpangan Ekonomi Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kriminalitas Di Propinsi Sumatera Utara | Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Perkembangan ekonomi yang dilihat dari PDRB per kapita Provinsi Sumatera Utara selama tahun pengamatan menunjukkan adanya tren yang semakin meningkat dilihat dari data tahun terakhir yang merupakan angka tertinggi sebesar 30 482 590,52, adapun menurut kabupaten/kota di Provinsi Sumatera nilai PDRB per kapita selama tahun pengamatan juga mengalami peningkatan nilai PDRB yang tertinggi terdapat di Kota Medan dengan angka 53 623967,96. Ketimpangan ekonomi Provinsi Sumatera Utara yang dilihat dari Gini Ratio selama tahun pengamatan berada di angka 0,35 yang artinya pembangunan ekonomi dan distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Utara relative merata, dan nilai Gini Ratio tertinggi menurut kabupaten/kota selama tahun pengamatan terjadi di Samosir dengan angka 0,447. Ketimpangan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kriminalitas. Sehingga ketika ketimpangan ekonomi naik maka akan diikuti dengan peningkatan tingkat kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara. |
| 3 | Dewanto dkk (2014) | Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kawasan Mebidangro | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di kawasan Mebidangro berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.Sedangkan dilihat dari nilai elastisitas netto kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomihasilnya adalah pertumbuhan ekonomi mampu menurunkan kemiskinan tetapi ketimpangan pendapatan menjadi penghambat atau mengurangi efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam pengentasan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi di kawasan Mebidangro selama tahun 2004-2011 bersifat tidak pro kemiskinan (anti poor) yang ditandai dengan angka indeks pro-poor growth |

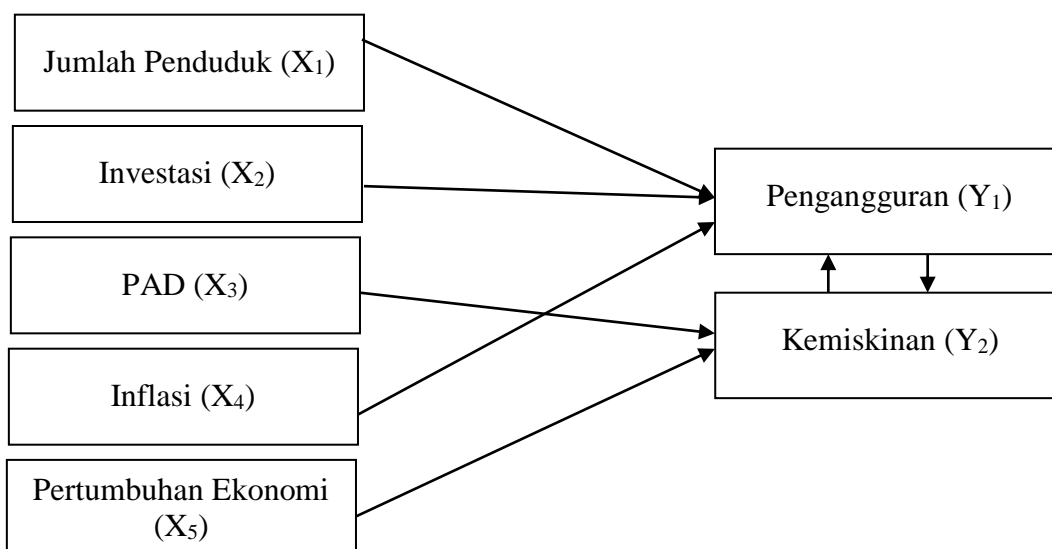
| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | sebesar -7,824. Sedangkan sektor-sektor yang berpengaruh dalam pengentasan kemiskinan adalah sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, perdagangan, hotel dan restoran, dan angkutan dan komunikasi. |
| 4 | Andiny dan Mandasari (2017) | Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Di Provinsi Aceh | Berdasarkan hasil tersebut maka H_0 diterima yang artinya variabel X_2 (kemiskinan) secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel Ketimpangan di Provinsi Aceh. Nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ adalah $0,073 < 0,930$. Berdasarkan hasil tersebut maka H_0 diterima, yang artinya variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan secara simultan tidak berpengaruh terhadap Ketimpangan di Provinsi Aceh. Nilai R^2 sebesar 0,020 atau 2,0 persen. Hasil ini menunjukkan variabel Ketimpangan dipengaruhi oleh variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan sebesar 2,0 persen, selebihnya Ketimpangan dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 98 persen yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. |
| 5 | Kartira Dorcas Andhiani; Erfit; Adi Bhakti (2018) | Analisis pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan di Wilayah Sumatera | Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera cenderung mengalami penurunan, sedangkan ketimpangan pembangunan berkisar antara IW 0,406-0,446. Tingkat ketimpangan tertinggi terjadi tahun 2012 di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 0,876 dan terendah terjadi tahun 2014 di Provinsi Lampung dengan angka 0,103. Berdasarkan hasil regresi data panel diketahui bahwa secara simultan investasi, belanja pemerintah, aglomerasi, dan tenaga kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Demikian juga, secara simultan investasi, belanja pemerintah, aglomerasi, dan tenaga kerja berpengaruh juga terhadap ketimpangan pembangunan. |
| 6 | Jonaidi (2012) | pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia | Hasil menunjukkan bahwa ada interaksi diantara kedua arah tersebut antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Efek yang signifikan terhadap |

| | | | |
|---|--------------------------------|---|---|
| | | | <p>pertumbuhan ekonomi dalam pengentasan kemiskinan, terutama di daerah perdesaan terdapat banyak pengantongan kemiskinan. Kebalikan dari kemiskinan tersebut juga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan peningkatan akses terhadap modal, kualitas pendidikan (melek huruf dan peningkatan lama pendidikan) dan kesehatan (peningkatan harapan hidup) orang miskin dapat meningkatkan produktifitas mereka dalam usaha selama periode 2005-2009. Tingkat pengangguran investasi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan selanjutnya investasi dalam negeri maupun luar negeri, harapan hidup, melek huruf, dan sekolah lebih lama berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia.</p> |
| 7 | Sari, Anwar, Darussamin (2016) | Faktor PDRB, tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2004-2013 | <p>Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB variabel, pendidikan dan pengangguran berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan. Sebagian PDRB dan pendidikan berdampak negatif terhadap kemiskinan dan pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan yang ada di Sumatera Selatan pada Periode 2004-2013.</p> |
| 8 | Purnama (2017) | Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara | <p>Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian study dokumentasi, browsing internet, data sekunder tahun 1996-2015 dari instansi menggunakan Badan Pusat Statistika (BPS) Sumatera Utara, dengan menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana. Hasil dari pengolahan data terdapat pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara.</p> |
| 9 | Rise, Dahen, Utami (2015) | Pengaruh pendidikan, pengangguran dan kesehatan terhadap jumlah | <p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penduduk miskin di Sumatera Barat. Artinya, semakin tinggi pendidikan masyarakat maka akan</p> |

| | | | |
|----|----------------|--|---|
| | | penduduk miskin di Sumatera Barat | mengurangi jumlah penduduk miskin. Terdapat pengaruh yang signifikan antar pengangguran dengan penduduk miskin di Sumatera Barat. Terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara kesehatan dan penduduk miskin di Sumatera Barat. Artinya, semakin tinggi kesehatan maka akan semakin turun jumlah kemiskinan. Besarnya pengaruh rata-rata tingkat sekolah, tingkat kesehatan dan jumlah pengangguran terhadap jumlah miskin yang ada di Sumatera Barat yaitu sebesar 96.9% dan sisanya 3.1% yang dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. |
| 10 | Pratomo (2015) | Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil dan belanja daerah terhadap tingkat kemiskinan DKI Jakarta | Hasil pengujian variabel yang signifikan sementara adalah Dana Bagi Hasil terhadap kemiskinan. Variabel yang tidak signifikan adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah terhadap kemiskinan. Koefisien determinasi menunjukkan besarnya pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap angka kemiskinan. |

C. Kerangka Konseptual

Kerangka pemikiran adalah penjelasan sementara gejala yang menjadi objek permasalahan penelitian. Kerangka ini disusun berdasarkan kajian teoritis dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Kerangka ini merupakan argumentasi dalam merumukan hipotesis atau pernyataan lainnya.



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap penelitian yang masih perlu diuji kebenarannya. Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah dan kerangka konseptual yang telah dikemukakan di atas maka dapatlah dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk, investasi, inflasi dan kemiskinan berpengaruh secara simultan terhadap pengangguran di Provinsi Sumatera Utara.
2. PAD, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran berpengaruh secara simultan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah analisis kuantitatif yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan keadaan objek penelitian yang dianalisis dan data yang diperoleh melalui data sekunder yang diklasifikasikan dan selanjutnya diinterpretasikan dengan menggunakan rumus regresi simultan dengan bantuan program eviews 7.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini penulis rencanakan mulai dari Maret s/d November 2019. Hal ini tergambar dalam jadwal rencana kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.1. Jadwal Penelitian

| No | Jenis Kegiatan | Tahun | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| | | 2019 | | | | | | | | |
| | | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sept | Okt | Nov |
| 1 | Pengajuan dan Pengesahan Judul | | | | | | | | | |
| 2 | Pengajuan dan Pengesahan Outline | | | | | | | | | |
| 3 | Persiapan Instrumen Penelitian | | | | | | | | | |
| 4 | Seminar Out line | | | | | | | | | |
| 5 | Pengumpulan Data | | | | | | | | | |
| 6 | Pengolahan Data | | | | | | | | | |
| 7 | Analisis Data dan Evaluasi | | | | | | | | | |
| 8 | Penyempurnaan dan Penulisan Laporan | | | | | | | | | |
| 9 | Sidang Meja Hijau | | | | | | | | | |

Sumber : Rencana Penelitian, 2019.

C. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional dipergunakan untuk memberikan penjelasan mengenai batas-batas yang akan dibahas atau diteliti, maka penulis merumuskan definisi operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengangguran (Y_1) adalah suatu keadaan di mana seseorang tergolong dalam angkatan kerja yang ingin mendapat pekerjaan tetapi belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut
2. Kemiskinan (Y_2) adalah kondisi dimana seseorang atau suatu kelompok hidup dibawah garis kemiskinan dengan standar hidup yang rendah. Sebagai akibat dari standar hidup yang relatif rendah karna tingkat pendapatan yang rendah, ketimpangan pendapatan yang parah, dan lain-lain
3. Jumlah penduduk (X_1) merupakan suatu populasi yang mendiami wilayah suatu daerah atau negara.
4. Investasi (X_2) merupakan salah satu penanaman modal yang dilakukan perorangan atau kelompok.
5. PAD (X_3) merupakan suatu pendapatan yang diperoleh dari warga yang mendiami wilayah atau daerah tertentu.
6. Inflasi (X_4) merupakan perkembangan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara
7. Pertumbuhan ekonomi (X_5) merupakan proses kenaikan kapasitas produksi dalam suatu perekonomian secara berkesinambungan menuju ke arah yang lebih baik yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional (Produk Domestik Bruto) maupun pendapatan daerah (Produk Domestik Regional Bruto) dalam jangka panjang.

D. Sumber Data

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dimana data tersebut adalah data yang berasal dari data laporan Badan Pusat (BPS).

E. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Penelitian lapangan yang penulis lakukan adalah dengan terjun langsung kesasaran penelitian yang dijadikan pembahasan dengan cara :

1. Wawancara

Yaitu memperoleh data dengan tatap muka, tanya jawab secara lisan dan berusaha mencari keterangan lainnya dari orang yang dapat memberikan keterangan.

2. Studi Dokumentasi

Yaitu mempelajari data atau laporan-laporan yang terdapat di perusahaan, dalam hal ini adalah Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara.

F. Teknik Analisis Data

1. Analisis Persamaan Simultan

Model analisis menggunakan 2 persamaan simultan yaitu pengangguran dan kemiskinan sebagai berikut :

Persamaan Model

Persamaan Model 1 = Pengangguran = $f(\text{JMP, INV, INF, KMS})$

Persamaan Model 2 = Kemiskinan = $f(\text{PAD, PRE, PENG})$

Kedua persamaan tersebut ditransformasi ke dalam bentuk persamaan ekonometrika sebagai berikut :

Persamaan Ekonometrik

a. Persamaan 1

$$\text{Log (PENG)} \Rightarrow \alpha_0 + \alpha_1 \text{Log (JMP)} + \alpha_2 \text{Log (INV)} + \alpha_3 \text{Log (INF)} + \alpha_4 \text{Log (KMS)} + e_1$$

Dimana :

PENG = Pengangguran (%)

JMP = Jumlah Penduduk (Jiwa)

INV = Investasi (Milyar Rupiah)

INF = Inflasi (%)

KMS = Kemiskinan (%)

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ = Koefisien regresi

e_1 = term error

b. Persamaan 2

$$\text{Log (KMS)} \Rightarrow \alpha_0 + \alpha_1 \text{Log (PAD)} + \alpha_2 \text{Log (PRE)} + \alpha_3 \text{Log (PENG)} + e_2$$

Dimana :

KMS = Kemiskinan (%)

INF = Inflasi (%)

PRE = Pertumbuhan Ekonomi (%)

PENG = Pengangguran (%)

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ = Koefisien regresi

e_2 = term error

Adapun model regresi yang digunakan adalah sistem persamaan simultan dan analisis data eviews 7 sebagai berikut :

Persamaan Simultan

1. Persamaan Pertama

$$\begin{aligned} \text{Log (PENG)} = & C(10)+C(11)*\text{Log(JMP)}+C(12)*\text{Log(INV)}+C(13)*\text{Log(INF)} \\ & +C(14)*\text{Log(KMS)}+e_1 \end{aligned}$$

2. Persamaan Kedua

$$\begin{aligned} \text{Log (KMS)} = & C(20)+C(21)*\text{Log(PAD)}+C(22)*\text{Log(PRE)}+C(23)*\text{Log} \\ & (\text{PENG})+e_2 \end{aligned}$$

Keterangan :

Persamaan 1

P : Pengangguran

J : Jumlah Penduduk

V : Inverstasi

F : Inflasi

K : Kemiskinan

Persamaan 2

K : Kemiskinan

D : PAD

E : Pertumbuhan Ekonomi

P : Pengangguran

Persamaan Reduksi sebagai berikut :

$$P = \alpha_0 + \alpha_1 J + \alpha_2 V + \alpha_3 F + \alpha_4 K$$

$$K = \alpha_0 + \alpha_1 D + \alpha_2 E + \alpha_3 P$$

Selanjutnya dilakukan identifikasi simultan terhadap kedua persamaan tersebut yang bertujuan untuk mengetahui apakah persamaan tersebut dalam salah satu kondisi.

Under Identification

Exactly Identification

Over Identification

Menurut Koutsoyiannis dalam buku Rosiadi (2016), menyatakan bahwa agar metode 2SLS dapat diaplikasikan maka persyaratan identifikasi harus memenuhi kriteria tepat *exactly identification* atau *over identification*.

1. Identifikasi Persamaan Pertama

$$\begin{array}{l|l} K : 5 & K - k \\ M : 4 & 5 - 3 = 2 \\ k : 3 & M - 1 \\ & 2 - 1 = 1 \end{array}$$

$\boxed{Kk : M-1}$ *over identification*

2. Identifikasi Persamaan Kedua

$$\begin{array}{l|l} K : 5 & K - k \\ M : 3 & 5 - 2 = 3 \\ k : 2 & M - 1 \\ & 2 - 1 = 1 \end{array}$$

$\boxed{Kk : M-1}$ *over identification*

Setelah dilakukan identifikasi simultan pada persamaan pertama berada pada kondisi *exactly identification*. Dan persamaan kedua berada pada kondisi *over identification*. Maka persamaan tersebut sudah memenuhi karakteristik yang tepat sehingga model 2SLS yaitu *structural regression* (regresi simultan) harus memenuhi syarat asumsi klasik. Adapun uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian yaitu uji normalitas data dan uji autokorelasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi

| Tahun | JMP | INV | PAD | INF | PRE | PENG | KMS |
|-------|----------|-------------|-------------|-------|------|-------|-------|
| 1996 | 7944352 | 4.43599E+11 | 1.87738E+11 | 6.7 | 9.01 | 6.32 | 10.92 |
| 1997 | 8466792 | 2.40692E+11 | 2.55078E+11 | 13.1 | 5.7 | 5.19 | 11.27 |
| 1998 | 8644378 | 80063680000 | 3.96469E+11 | 83.56 | 10.9 | 7.06 | 30.77 |
| 1999 | 7705624 | 1.02716E+11 | 4.37075E+11 | 1.37 | 2.59 | 7.67 | 16.74 |
| 2000 | 11513973 | 1.19778E+11 | 5.60313E+11 | 5.73 | 4.83 | 8.52 | 15.84 |
| 2001 | 9023803 | 5.28645E+11 | 6.14459E+11 | 6.79 | 3.72 | 9.09 | 15.75 |
| 2002 | 9119076 | 6.53034E+11 | 7.79616E+11 | 9.59 | 4.07 | 10.3 | 15.84 |
| 2003 | 7890583 | 8.13369E+12 | 9.11754E+11 | 4.23 | 4.48 | 11.02 | 15.89 |
| 2004 | 7997002 | 1.04603E+12 | 1.13607E+12 | 6.8 | 5.74 | 11.08 | 14.93 |
| 2005 | 12326678 | 8.21644E+11 | 1.36182E+12 | 22.41 | 5.48 | 11.9 | 14.68 |
| 2006 | 12643494 | 1.09425E+12 | 1.50261E+12 | 6.11 | 6.2 | 11.51 | 15.66 |
| 2007 | 12834371 | 1.67246E+12 | 1.69385E+12 | 6.6 | 6.9 | 10.1 | 13.9 |
| 2008 | 13042317 | 1.09133E+12 | 2.18131E+12 | 9.72 | 6.39 | 9.1 | 12.55 |
| 2009 | 13248386 | 1.64497E+12 | 2.01607E+12 | 2.61 | 5.07 | 8.45 | 11.51 |
| 2010 | 12982204 | 2.62544E+12 | 2.55478E+12 | 8 | 6.42 | 7.43 | 11.36 |
| 2011 | 13103596 | 2.04906E+13 | 3.57846E+12 | 3.67 | 6.66 | 8.18 | 10.83 |
| 2012 | 13215401 | 2.97019E+12 | 4.0521E+12 | 3.86 | 6.45 | 6.28 | 10.41 |
| 2013 | 13326307 | 5.06888E+12 | 4.09129E+12 | 6.18 | 6.07 | 6.45 | 10.39 |
| 2014 | 13766851 | 4.63193E+12 | 4.41681E+12 | 8.17 | 5.23 | 6.23 | 9.85 |
| 2015 | 13937797 | 3.48742E+11 | 4.88388E+12 | 3.24 | 5.09 | 6.71 | 10.53 |
| 2016 | 14102911 | 4.8642E+11 | 4.691E+12 | 6.34 | 5.18 | 5.84 | 10.27 |
| 2017 | 14262147 | 1.16836E+12 | 49260000000 | 3.2 | 5.12 | 5.6 | 10.22 |
| 2018 | 14415400 | 2.482E+12 | 5.73243E+14 | 1.23 | 5.02 | 5.56 | 9.22 |

Sumber data: bps sumut

Provinsi Sumatera Utara beribukota Medan, Terletak antara 10 - 40 LU, 980 - 1000 B.T. Batas wilayahnya sebelah utara provinsi Aceh dan Selat Sumatera, sebelah barat berbatasan dengan provinsi Sumatera Barat dan Riau, sedangkan sebelah Timur di batasi oleh Selat Sumatera Provinsi Sumatera Utara terletak pada 10-40 Lintang Utara dan 980 1000 Bujur Timur, yang pada tahun 2004 memiliki 18 Kabupaten dan 7 kota, dan terdiri dari 328 kecamatan, secara keseluruhan Provinsi Sumatera Utara mempunyai 5.086 desa dan 382 kelurahan. Luas daratan Provinsi Sumatera Utara 71.680 km².

Pemerintah Provinsi (Pemprop) Sumatera Utara juga sudah membangun berbagai prasarana dan infrastruktur untuk memperlancar perdagangan baik antar kabupaten di Sumatera Utara maupun antara Sumatera Utara dengan provinsi lainnya. Sektor swasta juga terlibat dengan mendirikan berbagai properti untuk perdagangan, perkantoran, hotel dan lain-lain. Tentu saja sektor lain, seperti koperasi, pertambangan dan energi, industri, pariwisata, pos dan telekomunikasi, transmigrasi, dan sektor sosial kemasyarakatan juga ikut dikembangkan. Untuk memudahkan koordinasi pembangunan, maka Sumatera Utara dibagi kedalam empat wilayah Pembangunan.

Sumatera Utara merupakan provinsi yang keempat terbesar jumlah penduduknya di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Menurut hasil pencacahan lengkap Sensus Penduduk (SP) 1990 penduduk Sumatera Utara pada tanggal 31 Oktober 1990 (hari sensus) berjumlah 10,81 juta jiwa, dan pada tahun 2002, jumlah penduduk Sumatera Utara diperkirakan sebesar 11,85 juta jiwa. Kepadatan penduduk Sumatera Utara tahun 1990 adalah 143 jiwa per km² dan tahun 2002 meningkat menjadi 165 jiwa per km²,

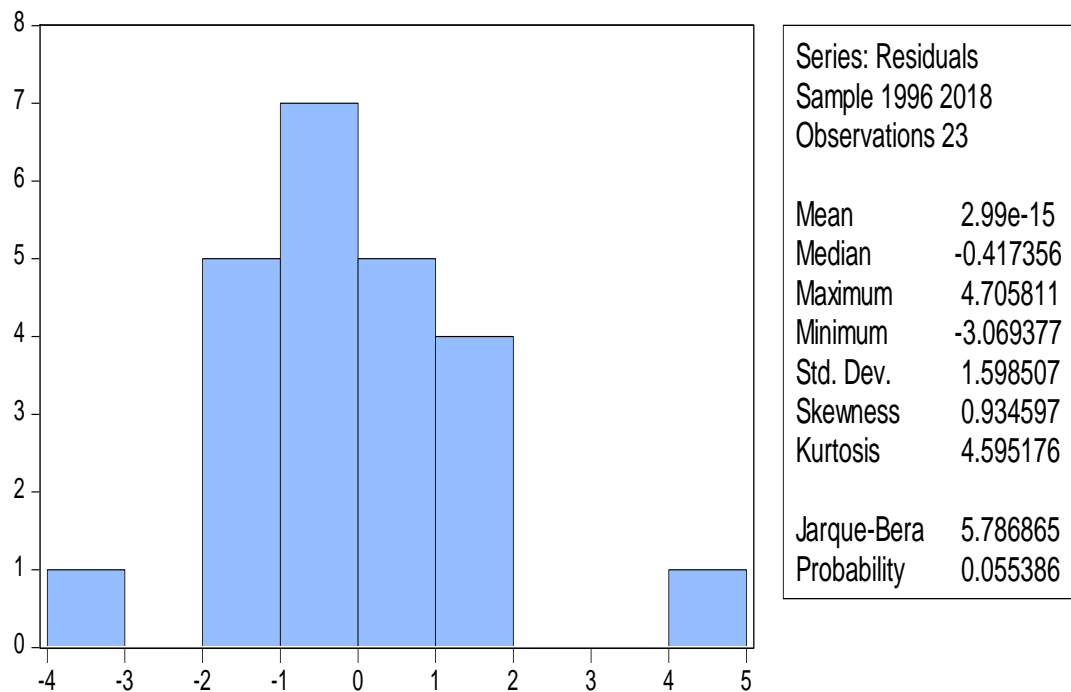
sedangkan laju pertumbuhan penduduk Sumatera Utara selama kurun waktu tahun 1990-2000 adalah 1,20 persen per tahun.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatera Utara setiap tahunnya tampak berfluktuasi. Pada tahun 2000, TPAK di daerah ini sebesar 57,34 persen, tahun 2001 naik menjadi 57,70 persen, tahun 2002 naik lagi menjadi 69,45 persen.

B. Hasil Penelitian

a. Uji Asumsi Klasik

1) UJI NORMALITAS DATA



| Series : redual Sampel 1996 2018 Observations 23 | |
|--|-----------|
| Mean | 2.99e-15 |
| Median | -0.417356 |

| | |
|-------------|-----------|
| Maximum | 4.7056811 |
| Minimum | -3.069377 |
| Std. dev. | 1.598507 |
| Skewness | 0.934597 |
| Kurtosis | 4.595176 |
| Jarque-bera | 5.786865 |
| Probability | 0.055386 |

Pada penelitian ini, untuk menguji normalitas data digunakan uji jarque-bera. Kriteria yang digunakan adalah jika nilai probabilitas jarque-bera (JB) test $>$ alpha (0,05), maka data dikatakan berdistribusi normal. Pada tabel di atas diketahui bahwa nilai probabilitas sebesar $0.055 < 0,05$ sehingga asumsi normalitas telah terpenuhi

1) UJI AUTOKORELASI

System Residual Portmanteau Tests for Autocorrelations

Null Hypothesis: no residual autocorrelations up to lag h

Date: 09/25/19 Time: 13:00

Sample: 1996 2018

Included observations: 23

| Lags | Q-Stat | Prob. | Adj Q-Stat | Prob. | df |
|------|----------|--------|------------|--------|----|
| 1 | 11.88321 | 0.0182 | 12.42336 | 0.2145 | 4 |
| 2 | 18.56351 | 0.0174 | 19.73987 | 0.1114 | 8 |
| 3 | 23.37517 | 0.0247 | 25.27328 | 0.2136 | 12 |
| 4 | 27.60630 | 0.0352 | 30.39518 | 0.4161 | 16 |
| 5 | 28.94042 | 0.0889 | 32.09988 | 0.3422 | 20 |
| 6 | 34.64850 | 0.0738 | 39.82259 | 0.3223 | 24 |
| 7 | 44.25401 | 0.0262 | 53.63051 | 0.4025 | 28 |
| 8 | 47.45973 | 0.0385 | 58.54594 | 0.4028 | 32 |

| | | | | | |
|----|----------|--------|----------|--------|----|
| 9 | 51.34904 | 0.0467 | 64.93553 | 0.5022 | 36 |
| 10 | 54.99714 | 0.0575 | 71.38985 | 0.5017 | 40 |
| 11 | 57.05703 | 0.0895 | 75.33797 | 0.6023 | 44 |
| 12 | 60.98701 | 0.0988 | 83.55521 | 0.4011 | 48 |

*The test is valid only for lags larger than the System lag order.

df is degrees of freedom for (approximate) chi-square distribution

Berdasarkan hasil data di atas diketahui nilai probbability q set pada semua indikator pergerakan lags dari waktu ke waktu menunjukkan adanya efek aotokorelasi dalam pergerakan data, dimana nilai prob Q-stat dan prob Adj Q-stat seluruhnya melebihi atau lebih besar dari angka 0,05 maka seluruh data di atas berdistribusi normal atau tidak terkena masalah aotokorelasi.

b. Pengujian Simultan

a) Uji TSLS (Two Stage Least Square)

Estimasi untuk mengetahui pengaruh variabel secara 2 persamaan simultan dilakukan dengan menggunakan model *Two-Stage Least Squares*. Hasil estimasi sistem persamaan dengan *Two-Stage Least Squares* ditunjukkan pada tabel dibawah ini. Dari tabel diketahui 2 (dua) persamaan model simultannya :

$$\text{Log(PENG)} = C(10) + C(11) * \text{Log(JMP)} + C(12) * \text{Log(INV)} + C(13) * \text{Log(INF)} + C(14) * \text{Log(KMS)}$$

$$\text{Log (KMS)} = C(20) + C(21) * \text{Log(PAD)} + C(22) * \text{Log(PRE)} + C(23) * \text{Log (PENG)}$$

Gambar:

Uji TSLS (Two Stage Least Square) Indonesia

System: YCM

Estimation Method: Two-Stage Least Squares

Date: 09/25/19 Time: 13:06

Sample: 1996 2018

Included observations: 23

Total system (balanced) observations 46

| | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|-------|-------------|------------|-------------|--------|
| C(10) | 1.866161 | 3.060936 | 0.609670 | 0.0458 |
| C(11) | 0.106240 | 0.111753 | -0.950665 | 0.0479 |
| C(12) | -0.032284 | 0.055986 | 0.576651 | 0.0077 |
| C(13) | 0.069079 | 0.126887 | -0.544413 | 0.0494 |
| C(14) | 0.444517 | 0.505895 | 0.878675 | 0.0052 |
| C(20) | 1.971083 | 3.333666 | 0.591266 | 0.0579 |
| C(21) | -0.042807 | 0.057865 | -0.739760 | 0.0041 |
| C(22) | -0.210389 | 0.225518 | 0.932913 | 0.0569 |
| C(23) | 0.695012 | 0.794730 | 0.874525 | 0.0375 |

Determinant residual covariance 0.001411

Equation: LOG (PENG) =

C(10)+C(11)*LOG(JMP)+C(12)*LOG(INV)+C(13)

*LOG(INF)+C(14)*LOG(KMS)

Instruments: C JMP INV INF PAD PRE

Observations: 23

| | | | |
|--------------------|----------|--------------------|----------|
| R-squared | 0.380402 | Mean dependent var | 2.056012 |
| Adjusted R-squared | 0.242713 | S.D. dependent var | 0.258258 |
| S.E. of regression | 0.224742 | Sum squared resid | 0.909164 |
| Durbin-Watson stat | 0.418335 | | |

Equation: LOG (KMS) =
 $C(20)+C(21)*LOG(PAD)+C(22)*LOG(PRE)+C(23)*LOG(PENG)$

Instruments: C JMP INV INF PAD PRE

Observations: 23

| | | | |
|--------------------|----------|--------------------|----------|
| R-squared | 0.372920 | Mean dependent var | 2.559268 |
| Adjusted R-squared | 0.273907 | S.D. dependent var | 0.270074 |
| S.E. of regression | 0.230133 | Sum squared resid | 1.006260 |
| Durbin-Watson stat | 0.913075 | | |

Berdasarkan hasil output persamaan struktural dapat diketahui adanya dua persamaan. Berikut masing – masing penjelasan dalam 2 persamaan.

Hasil uji persamaan 1 : Pengangguran

Persamaan pertama adalah persamaan yang digunakan untuk mengetahui secara simultan terhadap pengangguran dengan persamaan berikut :

Log (PENG) =

$C(10)+C(11)*Log(JMP)+C(12)*Log(INV)+C(13)*Log(INF)+C(14)*Log(KMS)$

LOG(PENG) =

$$1.86 + 0,10 \text{LOG}(\text{JMP}) - 0,03 \text{LOG}(\text{INV}) + 0,06 \text{LOG}(\text{INF}) + 0,44 \text{LOG}(\text{KMS})$$

a) Koefisien dan elastisitas JMP terhadap PENG

- Nilai koefisien JMP = 0,106

Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa koefisien regresi untuk JMP positif 0.106 mengandung arti bahwa setiap peningkatan terhadap JMP sebesar 1 persen maka PENG akan mengalami kenaikan sebesar 0.106 persen.

- Elastisitas JMP

$$\begin{aligned} E_{\text{JMP}} &= \frac{d\text{JMP}}{d\text{PENG}} \times \frac{\text{JMP}}{\text{PENG}} \\ &= 0,106 \times \frac{1295744}{8069130} \end{aligned}$$

$$E_{\text{JMP}} = 0,01 < 1 = \text{INELASTIS}$$

Hasil koefisien regresi diketahui nilai positif inelastis Artinya; peningkatan JMP akan menghasilkan persentasi kenaikan terhadap PENG

b) Koefisien dan elastisitas INV terhadap PENG

- Nilai koefisien INV = -0,032

Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa koefisien regresi untuk INV negatif -0.032 mengandung arti bahwa setiap peningkatan terhadap INV sebesar 1 persen maka PENG akan mengalami penurunan sebesar 0.032 persen.

- Elastisitas INV

$$E_{\text{INV}} = \frac{d\text{INV}}{d\text{PENG}} \times \frac{\text{INV}}{\text{PENG}}$$

$$\begin{aligned} \frac{dPENG}{PENG} &= -0,032 \times \frac{2680512}{80691304} \end{aligned}$$

$$E_{INV} = -0,01 < 1 = \text{INELASTIS}$$

Hasil koefisien regresi diketahui nilai negatif inelastis Artinya; peningkatan INV akan menghasilkan persentasi penurunan terhadap PENG

c) Koefisien dan elastisitas INF terhadap PENG

- Nilai koefisien INF = 0,069

Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa koefisien regresi untuk INF positif 0.069 mengandung arti bahwa setiap peningkatan terhadap INF sebesar 1 persen maka PENG akan mengalami kenaikan sebesar 0.069 persen.

- Elastisitas INF

$$\begin{aligned} E_{INF} &= \frac{dINF}{dPENG} \times \frac{INF}{PENG} \\ &= 0,069 \times \frac{9965652}{8069130} \end{aligned}$$

$$E_{INF} = 0,08 < 1 = \text{INELASTIS}$$

Hasil koefisien regresi diketahui nilai positif inelastis Artinya ; peningkatan INF akan menghasilkan persentasi kenaikan terhadap PENG

d) Koefisien dan elastisitas KMS terhadap PENG

- Nilai koefisien KMS = 0,444

Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa koefisien regresi untuk KMS positif 0.444 mengandung arti bahwa setiap peningkatan terhadap KMS sebesar 1 persen maka PENG akan mengalami kenaikan sebesar 0.444 persen.

- Elastisitas KMS

$$\begin{aligned} EKMS &= \frac{dKMS}{dPENG} \times \frac{KMS}{PENG} \\ &= 0,444 \times \frac{1344913043}{8069130435} \end{aligned}$$

$$EKMS = 0,07 < 1 = \text{INELASTIS}$$

Hasil koefisien regresi diketahui nilai positif inelastis Artinya ; peningkatan KMS akan menghasilkan persentasi kenaikan terhadap PENG yang lebih besar

c. UJI T

1) PERSAMAAN 1

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antar variable, yaitu antara JMP, INV, INF, KMS terhadap PENG.

- $JMP = 0.047 < 0.05 \rightarrow$ signifikan
- $INV = 0.007 < 0.05 \rightarrow$ signifikan
- $INF = 0.049 < 0.05 \rightarrow$ signifikan
- $KMS = 0.005 < 0.05 \rightarrow$ signifikan

Berdasarkan hasil estimasi diketahui bahwa seluruh variabel mempengaruhi secara simultan terhadap PENG maka H_0 diterima Artinya JMP, INV, INF, KMS mampu mempengaruhi secara simultan terhadap PENG

d. UJI D

1) PERSAMAAN 1

Nilai adjusted r square sebesar 0.24271 atau 24% artinya variabel JMP, INV, INF dan KMS hanya mampu mempengaruhi PENG sebesar 24% sedangkan sisanya sebesar 76% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian

a) Hasil uji persamaan 2 : Kemiskinan

Gambar:

Uji TSLS (Two Stage Least Square) Indonesia

System: YCM

Estimation Method: Two-Stage Least Squares

Date: 09/25/19 Time: 13:06

Sample: 1996 2018

Included observations: 23

Total system (balanced) observations 46

| | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|-------|-------------|------------|-------------|--------|
| C(10) | 1.866161 | 3.060936 | 0.609670 | 0.0458 |
| C(11) | 0.106240 | 0.111753 | -0.950665 | 0.0479 |

| | | | | |
|-------|-----------|----------|-----------|--------|
| C(12) | -0.032284 | 0.055986 | 0.576651 | 0.0077 |
| C(13) | 0.069079 | 0.126887 | -0.544413 | 0.0494 |
| C(14) | 0.444517 | 0.505895 | 0.878675 | 0.0052 |
| C(20) | 1.971083 | 3.333666 | 0.591266 | 0.0579 |
| C(21) | -0.042807 | 0.057865 | -0.739760 | 0.0041 |
| C(22) | -0.210389 | 0.225518 | 0.932913 | 0.0569 |
| C(23) | 0.695012 | 0.794730 | 0.874525 | 0.0375 |

Determinant residual

covariance

covariance

Equation: LOG (PENG) = C(10)+C(11)*LOG(JMP)+C(12)*LOG(INV)+C(13)
*LOG(INF)+C(14)*LOG(KMS)

Instruments: C JMP INV INF PAD PRE

Observations: 23

| | | | |
|--------------------|----------|--------------------|----------|
| R-squared | 0.380402 | Mean dependent var | 2.056012 |
| Adjusted R-squared | 0.242713 | S.D. dependent var | 0.258258 |
| S.E. of regression | 0.224742 | Sum squared resid | 0.909164 |
| Durbin Watson stat | 0.418335 | | |

Equation: LOG (KMS) = C(20)+C(21)*LOG(PAD)+C(22)*LOG(PRE)+C(23)

Instruments: C JMP INV INF PAD PRE

Observations: 23

| | | | | |
|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|
| R-squared | 0.372920 | Mean dependent var | 2.559268 | R-squared |
| Adjusted R-squared | 0.273907 | S.D. dependent var | 0.270074 | Adjusted R-squared |
| S.E. of regression | 0.230133 | Sum squared resid | 1.006260 | S.E. of regression |

Durbin-Watson stat 0.913075

2) PERSAMAAN 2

Persamaan kedua adalah persamaan yang digunakan untuk mengetahui secara simultan terhadap kemiskinan dengan persamaan berikut :

Log (KMS) =

C(20)+C(21)*Log(PAD)+C(22)*Log(PRE)+C(23)*Log(PENG)

LOG (KMS) = 1.971-0.042*LOG(PAD) -0,210*LOG(PRE) +

0,695*LOG(PENG)

a) Koefisien dan elastisitas PAD terhadap KMS

- Nilai koefisien PAD = -0,042
- Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa koefisien regresi untuk PAD negatif -0.042 mengandung arti bahwa setiap peningkatan terhadap PAD sebesar 1 persen maka KMS akan mengalami penurunan sebesar 0.042 persen.
- Elastisitas PAD

$$\begin{aligned} EPAD &= \frac{dPAD}{dKMS} \times \frac{PAD}{KMS} \\ &= -0,042 \times \frac{2676513}{1344913} \end{aligned}$$

$$EPAD = -0,08 < 1 = \text{INELASTIS}$$

Hasil koefisien regresi diketahui nilai negatif inelastis Artinya ; peningkatan PAD akan menghasilkan persentasi penurunan terhadap KMS

b) Koefisien dan elastisitas PRE terhadap KMS

- Nilai koefisien PRE = -0,210

Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa koefisien regresi untuk PRE negatif -0.210 mengandung arti bahwa setiap peningkatan terhadap PRE sebesar 1 persen maka KMS akan mengalami penurunan sebesar 0.210 persen.

- Elastisitas PRE

$$\begin{aligned} EPAD &= \frac{dPRE}{dKMS} \times \frac{PRE}{KMS} \\ &= \frac{-0,210}{1} \times \frac{4805217}{1344913} \end{aligned}$$

$$EPRE = -0,75 < 1 = \text{INELASTIS}$$

Hasil koefisien regresi diketahui nilai negatif inelastis Artinya ; peningkatan PRE akan menghasilkan persentasi penurunan terhadap KMS

c) Koefisien dan elastisitas PENG terhadap KMS

- Nilai koefisien PENG = 0,695

Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa koefisien regresi untuk PENG positif 0,695 mengandung arti bahwa setiap peningkatan terhadap PENG sebesar 1 persen maka KMS akan mengalami kenaikan sebesar 0,695 persen.

- Elastisitas PENG

$$EPENG = \frac{dPENG}{dKMS} \times \frac{PENG}{KMS}$$

$$= 0,695 \times \frac{8069130}{1344913}$$

$$EPENG = 4,16 > 1 = \text{ELASTIS}$$

Hasil koefisien regresi diketahui nilai positif elastis Artinya; peningkatan PENG akan menghasilkan persentase kenaikan terhadap KMS yang lebih besar

e. UJI T

1) PERSAMAAN 2

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan atau tidak signifikan antar variable, yaitu antara PAD, PRE, dan PENG terhadap KMS.

- PAD =0.0041 < 0.05 → signifikan
- PRE =0.0569 < 0.05 → signifikan
- PENG =0.0375 < 0.05 → signifikan

Berdasarkan hasil estimasi di ketahui bahwa seluruh variabel mempengaruhi secara simultan terhadap KMS maka H_a diterima Artinya PAD, PRE, PENG, mampu mempengaruhi secara simulta terhadap KMS

f. UJI D

1) PERSAMAAN 2

Nilai adjusted r squer sebesar 0.273907 atau 27% artinya variabel PAD, PRE PENG hanya mampu mempengaruhi KMS sebesar 27% sedang kan

sisanya sebesar 73% di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian

2) PEMBAHASAN

a. persamaan 1

Persamaan pertama adalah persamaan yang digunakan untuk mengetahui secara simultan terhadap PENG, Hasil koeffesien regresi di ketahui nilai positif inelastis artinya jika JMP meningkat maka akan menghasilkan kenaikan terhadap PENG, Hasil koeffesien regresi di ketahui nilai negatif inelastis artinya jika INV meningkat maka akan menghasilkan penurunan terhadap PENG, Hasil koeffesien regresi di ketahui nilai positif inelastis artinya jika INF meningkat maka akan menghasilkan kenaikan terhadap PENG, Hasil koeffesien regresi di ketahui nilai positif inelastis artinya jika KMS meningkat maka akan menghasilkan kenaikan terhadap PENG. Berdasarkan hasil estimasi di ketahui bahwa seluruh variabel mempengaruhi secara simultan terhadap PENG maka H_0 diterima.

Artinya JMP, INV, INF, KMS mampu mempengaruhi secara simulta terhadap PENG. Nilai adjusted r squer sebesar 0.24271 atau 24% artinya variabel JMP, INV, INF dan KMS mampu mempengaruhi PENG sebesar 24% sedangkan sisanya sebesar 76% dan sisanya sebesar 61.96% PENG dipengaruhi oleh variabel lain diluar estimasi dalam model.

b. persamaan 2

Persamaan kedua adalah persamaan yang digunakan untuk mengetahui secara simultan terhadap KMS, Hasil koeffesien regresi di ketahui nilai negatif inelastis artinya jika PAD meningkat maka akan menghasilkan penurunan

terhadap KMS, Hasil koefisien regresi diketahui nilai negatif inelastis artinya jika PRE meningkat maka akan menghasilkan penurunan terhadap KMS, Hasil koefisien regresi diketahui nilai positif elastis artinya jika PENG meningkat maka akan menghasilkan kenaikan terhadap KMS. Berdasarkan hasil estimasi diketahui bahwa seluruh variabel mempengaruhi secara simultan terhadap KMS maka H_0 diterima. Artinya PAD, PRE, PENG, mampu mempengaruhi secara simultan terhadap KMS. Pada uji determinasi variabel PAD, PRE, PENG hanya mampu mempengaruhi KMS sebesar 27% sedangkan sisanya sebesar 73% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Penulis memperoleh kesimpulan yang di ambil dari penelitan mengenai Pertumbuhan Ekonomi, Kebijakan Fiskal Dan Moneter Terhadap Kemiskinan Di Sumatera Utara :

1. Dari hasil estimasi uji persamaan pertama jumlah penduduk, dan Investasi berpengaruh signifikan terhadap pengangguran dengan nilai $0.047 < 0.05$, dan nilai Investasi $0.007 < 0.05$ maka H_0 di terima artinya Jumlah Penduduk dan Investasi mampu mempengaruhi secara simultan terhadap pengangguran. Begitu juga dengan Inflasi dan Kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap pengangguran dengan nilai $0.049 < 0.05$ dan nilai Kemiskinan $0.005 < 0.05$ maka H_0 di terima artinya Jumlah Penduduk dan Investasi mampu mempengaruhi secara simultan terhadap pengangguran di Sumatera Utara.
2. Dari hasil estimasi uji persamaan kedua di Sumatera Utara pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai $0.0041 < 0.05$ maka H_0 di terima artinya Pendapatan asli daerah mampu mempengaruhi secara simultan terhadap Kemiskinan. Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi dan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai $0.0569 < 0.05$ maka H_0 di terima artinya Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran mampu mempengaruhi secara simultan terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara.

B. Saran

Ada pun saran yang di buat penulis dalam penelitian ini diantara lain adalah :

1. Bagi pemerintah provinsi, sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan di waktu yang akan datang dalam upaya mengurangi angka kemiskinan dan mengurangi pengangguran yang ada di Sumatera Utara.
2. Dalam mengatasi pengangguran yang ada di Sumatera Utara pemerintah hendaknya meningkatkan lapangan usaha dan memberikan pelatihan kepada masyarakat agar dapat bersaing dengan tenaga kerja asing.
3. Diharapkan bagi pembaca untuk melihat fenomena yang ada di sekitar dan di harapkan ikut serta dalam membuka lapangan pekerjaan, agar adanya kerja sama yang baik yang di bangun oleh masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup yang ada di Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adil, E., Nasution, M. D. T. P., Samrin, S., & Rossanty, Y. (2017). Efforts to Prevent the Conflict in the Succession of the Family Business Using the Strategic Collaboration Model. *Business and Management Horizons*, 5(2), 49-59.
- Aditya, Sri N. P. (2007). Analisis Ketimpangan antar Wilayah dan Faktor- Faktor yang Mempengaruhinya dengan Model Panel Data (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2000-2007). *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Andiny, Puti dan Mandasari, Pipit. (2017). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Di Provinsi Aceh. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENS)*. Vol. 1. No. 2. Desember 2017.
- Arnita, V. (2018). Pengaruh Orangtua Terhadap Mahasiswa Akuntansi Dalam Pemilihan Karir Menjadi Profesi Akuntan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 4(2), 19-23.
- Arsyad, Lincoln. (2014). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Aspan, H., F. Milanie, and M. Khaddafi. (2015). "SWOT Analysis of the Regional Development Strategy City Field Services for Clean Water Needs". *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol. 5, No. 12, pp. 385-397.
- Aspan, H., I. M. Sipayung, A. P. Muharrami, and H. M. Ritonga. (2017). "The Effect of Halal Label, Halal Awareness, Product Price, and Brand Image to the Purchasing Decision on Cosmetic Products (Case Study on Consumers of Sari Ayu Martha Tilaar in Binjai City)". *International Journal of Global Sustainability*, ISSN 1937-7924, Vol. 1, No. 1, pp. 55-66.
- Badan Pusat Statistik, Sumatera Utara dalam Angka Berbagai Tahun terbitan, BPS Propinsi Sumatera Utara. (2015). Jumlah dan Persentase Penduduk Miskinn, Garis Kemiskinan, Indeks.
- Badrudin, Rudy. (2011). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Budiono. (2009). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Chamber, Robert. (2010). *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Provinsi- Provinsi di Indonesia*. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang
- Chamsyah, Bachtiar, (2016), *Teologi Penanggulangan Kemiskinan*, RM-Books, Jakarta.
- Chrisna, H. (2018). ANALISIS MANAJEMEN PERSEDIAAN DALAM MEMAKSIMALKAN PENGENDALIAN INTERNAL PERSEDIAAN

PADA PABRIK SEPATU FERRADINI MEDAN. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 82-92.

Depart, Edward. (2012). *Peranan Komunikasi Massa*. Jakarta: Grafindo Persada.

Dewanto, Pendi., Rujiman dan Suriadi, Agus. (2014). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kawasan Mebidangro. *Jurnal Ekonom*, Vol 17, No 3, Juli 2014.

Hariani dan Syahputri (2016). Analisis Ketimpangan Ekonomi Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kriminalitas Di Propinsi Sumatera Utara. *Jom FISIP*. Vol. 3 No. 3 - Februari 2016

Hasibuan, H. A., Purba, R. B., & Siahaan, A. P. U. (2016). Productivity assessment (performance, motivation, and job training) using profile matching. *SSRG Int. J. Econ. and Management Stud*, 3(6).

Ritonga, H. M., Hasibuan, H. A., & Siahaan, A. P. U. (2017). Credit Assessment in Determining The Feasibility of Debtors Using Profile Matching. *International Journal of Business and Management Invention*, 6(1), 73079.

Indrawan, M. I., Nasution, M. D. T. P., Adil, E., & Rossanty, Y. (2016). A Business Model Canvas: Traditional Restaurant “Melayu” in North Sumatra, Indonesia. *Bus. Manag. Strateg*, 7(2), 102-120.

Jhingan, M.L, (2010), *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jogiyanto, (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis, Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: BPPE.

Jonaidi (2012). Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan di Indonesia, diambil pada tanggal 11/05/2019 dari <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/742>.

Kaho, Riwu. (2005). *Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: Universitas terbuka.

Kartira Dorcas Andhiani; Erfit; Adi Bhakti (2018). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pembangunan di Wilayah Sumatera..

Koswara, E. (2011). *Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*. Jakarta: Pariba.

Kuncoro, Mudrajat (2010). *Dimensi Kemiskinan Desa dan Perkotaan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Lembaga BPS dalam Statistik Indonesia (2013)

- Lestario, F. (2018). DAMPAK PERTUMBUHAN BISNIS FRANCHISE WARALABA MINIMARKET TERHADAP PERKEMBANGAN KEDAI TRADISIONAL DI KOTA BINJAI. *JUMANT*, 7(1), 29-36.
- Nasution, D. A. D. (2018). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3), 149-162.
- Nizar, Moh. (2013). *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*, Padang: Badouse Media.
- Pratomo (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Dan Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan DKI Jakarta
- Purba, R. B. (2018). PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, TRANSPARANSI PUBLIK DAN AKTIVITAS PENGENDALIAN TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 99-111.
- Purnama (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Utara.
- Purnama, Nadia Ika. (2016). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Sumatera Utara. *Tesis*. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Rise, Dahen, Utami (2015). Pengaruh Pendidikan, Pengangguran Dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Barat
- Rusiadi., Subiantoro, Nur dan Hidayat, Rahmat. (2016). *Metode Penelitian : Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan. Konsep, Kasus dan Aplikasi SPSS, Eviews, Amos, Lisrel*. Medan:USU Press.
- Said. (2012). *Mengukur Kemiskinan & Distribusi Pendapatan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Saraswati, D. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Perimbangan sebagai Pemoderasi di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 54-68.
- Sari, Anwar, Darussamin (2016). Faktor PDRB, Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2004-2013
- Sari, M. N. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Underpricing Saham pada Saat Initial Public Offering di Bursa Efek Indonesia.
- Sastrowardoyo, (1994). *Ekonomi Untuk Negara-Negara Berkembang*, Penejemah: Agustinus Subekti, Ed, Jakarta: Bumi Aksara.
- Spicker, Paul. (2012). *Pengaruh Investasi Swasta dan Belanja Modal Terhadap Kemiskinan Di Kota Manado Tahun 2004- 2012*. *Jurnal*. Universitas Sam Ratulangi

- Sukimo, Sadono, (2016), *Makro Ekonomi Modern*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sumarsono, Sonny. (2009). *Ekonomi Sumber Daya Manusia Teori dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Sumedi dan Supardi, (2014), *Kemiskinan di Indonesia : Suatu Fenomena Ekonomi*.
- Tambunan, Tulus, T.H, (2011), *Perekonomian Indonesia, Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Tendelilin, Eduardus. (2011). *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Kanisius.
- Todaro, Michael P (2010). *Pembangunan Ekonomi*. Edisi 11. Jakarta Erlangga.
- Undang-undang No 1 tahun 1967, No 11 tahun 1970, tentang Penanaman Modal Asing (PMA)
- Undang-Undang Republik Indonesia NO. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- UU No 6 tahun 1968, No 12 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
- Wakhyuni, E. (2018). KEMAMPUAN MASYARAKAT DAN BUDAYA ASING DALAM MEMPERTAHANKAN BUDAYA LOKAL DI KECAMATAN DATUK BANDAR. *Jurnal Abdi Ilmu*, 11(1), 25-31.
- Wijayanto, Ravi Dwi. (2010), *Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2005-2008*, Skripsi SI, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.
- World Bank. *Pengangguran Merupakan Individu : Suatu Fenomena Ekonomi*